



# **RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra disusun melalui berbagai tahapan termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Renstra ini merupakan dasar dan pedoman bagi eselon II, III, IV, UPTD dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta acuan bagi SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Padang, April 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat,

**Adib Alfikri, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730413 199703 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN 1</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT .....</b>	<b>11</b>
2.1 Struktur Organisasi.....	11
2.2 Kondisi Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.....	12
2.3 Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat .....	19
2.4 Kinerja Layanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.....	20
2.5 Data Pendidikan .....	24
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan .....	43
2.7 Kondisi Implementasi pendidikan karakter layanan pendidikan .....	43
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT .....</b>	<b>46</b>
3.1 Identifikasi permasalahan.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Gubernur Provinsi Sumatera Barat.....	49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	56
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	57
3.5 Penentuan Isu Isu strategis .....	62
3.6 Isu Isu strategis Pendidikan Sumatera Barat .....	66
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN .....</b>	<b>75</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat .....	75
4.2 Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat .....	76
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT .....</b>	<b>87</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN ....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>95</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tema pembangunan Indonesia khususnya di bidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tema pembangunan pendidikan selama rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 terdiri dari empat tema yakni periode 2005-2009 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan. Periode 2010-2014 temanya adalah penguatan pelayanan pendidikan, sedangkan tema pembangunan pendidikan saat ini yakni periode 2015-2019 adalah menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional dan tema pembangunan pendidikan pada periode 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. (lihat Renstra Dikbud RI 2020-2024).

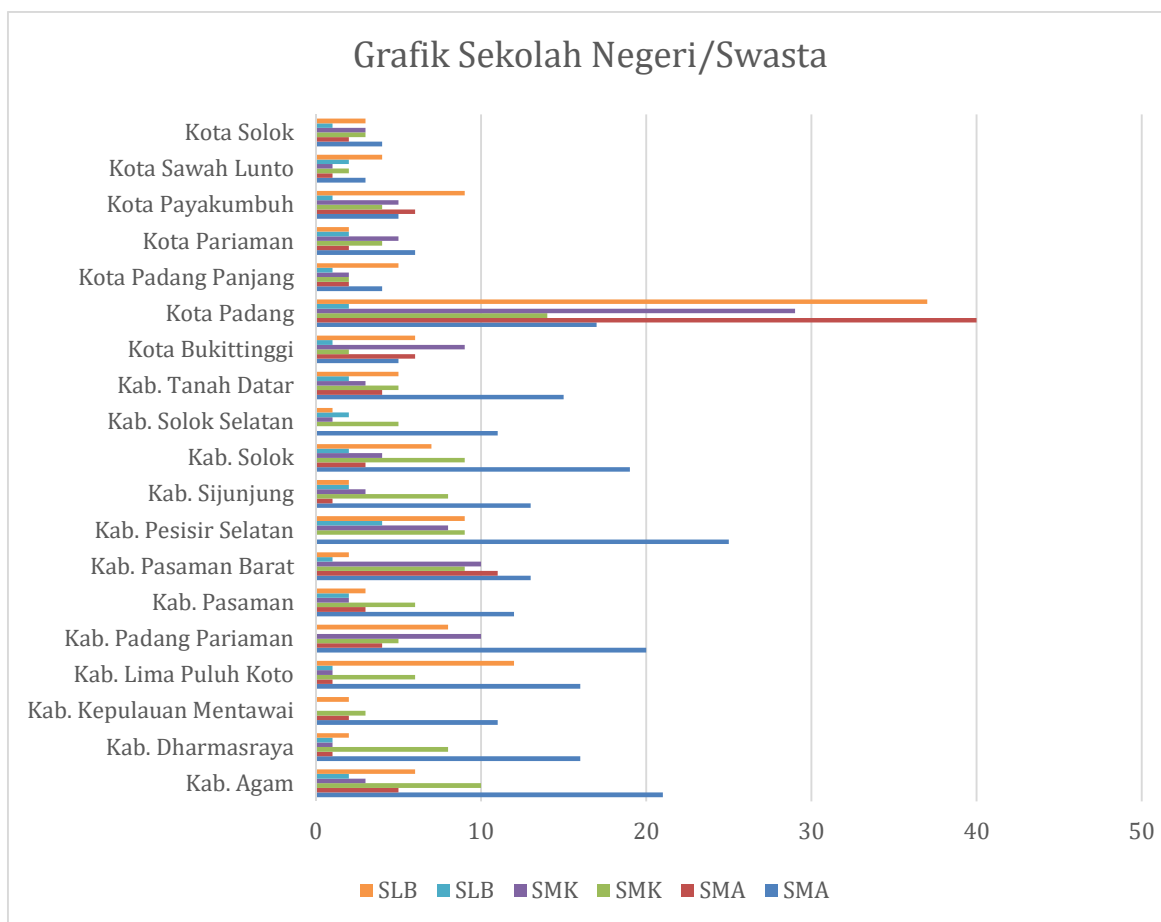
Pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan ini diarahkan oleh cara pandang (paradigma) agar sasaran yang dirumuskan dapat dicapai. Diantara paradigma pembangunan pendidikan nasional itu adalah: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Pendidikan untuk semua dimana pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan

harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Sedangkan pendidikan sebagai suatu gerakan adalah penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Pendidikan menghasilkan pembelajar adalah Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

Berikutnya pendidikan membentuk karakter adalah pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Selanjutnya sekolah yang menyenangkan adalah sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Semua paradigma pembangunan pendidikan ini tentunya harus menjadi koridor dalam pembangunan pendidikan ke depannya.

Kemampuan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan aksesibilitas pendidikan menengah atas tentunya tidak terlepas dari potensi jumlah sekolah yang dimiliki baik sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Jumlah sekolah menengah atas total adalah sebanyak 540 sekolah yang terdiri dari 330 (61,11%) SMA dan sebanyak 210 (38,88%) SMK. Dari jumlah SMA itu ternyata sebanyak 236 (70,44%) adalah SMA Negeri dan sebanyak 94 (28,48%) adalah SMA swasta dan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan pendidikan SMA itu didominasi oleh SMA negeri dan begitu juga SMK negeri, peran sekolah swasta pada jenis SMA ini masih relative kecil. Untuk lebih detilnya lihat gambar grafik di bawah ini:

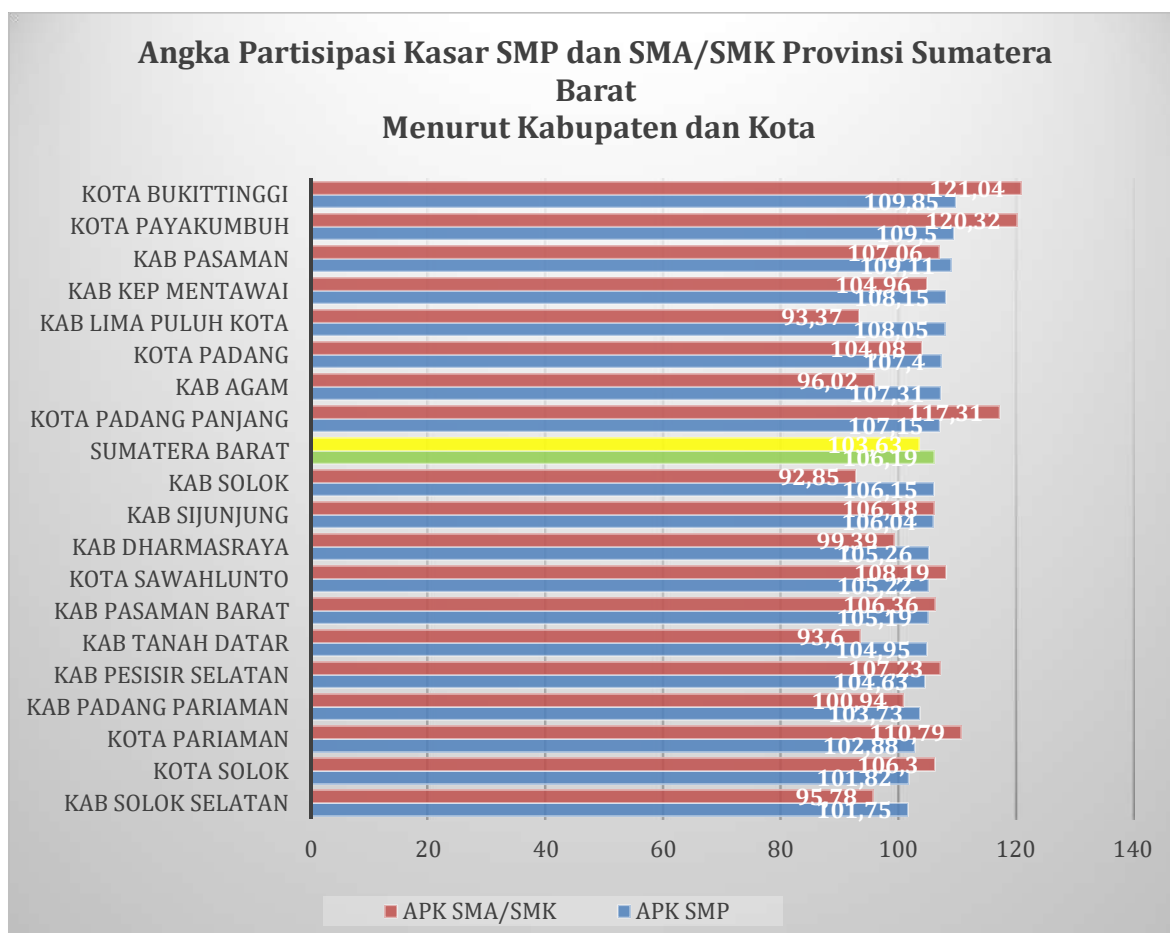


Gambar 1.1. Jumlah Sekolah SMA dan SMK Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2021

Jumlah lembaga pendidikan SMK adalah sebanyak 210 unit yang terdiri dari 110 (52,38%) SMK negeri dan sebanyak 100 (47,62%) adalah SMK Swasta, data ini menunjukkan potensi sekolah menengah kejuruan ini cukup berimbang potensinya di provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari segi lokasi, maka letak sekolah yang paling banyak itu terdapat di Kota Padang sebanyak 95 (17,92%), disusul oleh kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman Barat yang jumlahnya sama yakni sebanyak 41(7,74%). Sedangkan wilayah kabupaten dan kota yang paling sedikit memiliki jumlah sekolah adalah Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padang Panjang.

Apabila dikaitkan dengan angka partisipasi kasar (APK) SMA dan SMK ini, maka dua wilayah Kota yakni Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang ternyata memiliki angka APK berada di bawah rata-rata Sumatera Barat masing-masing secara berturut turut adalah 79.77 dan

76.97 jauh berada di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80.46 untuk lebih detilnya lihat gambar di bawah:



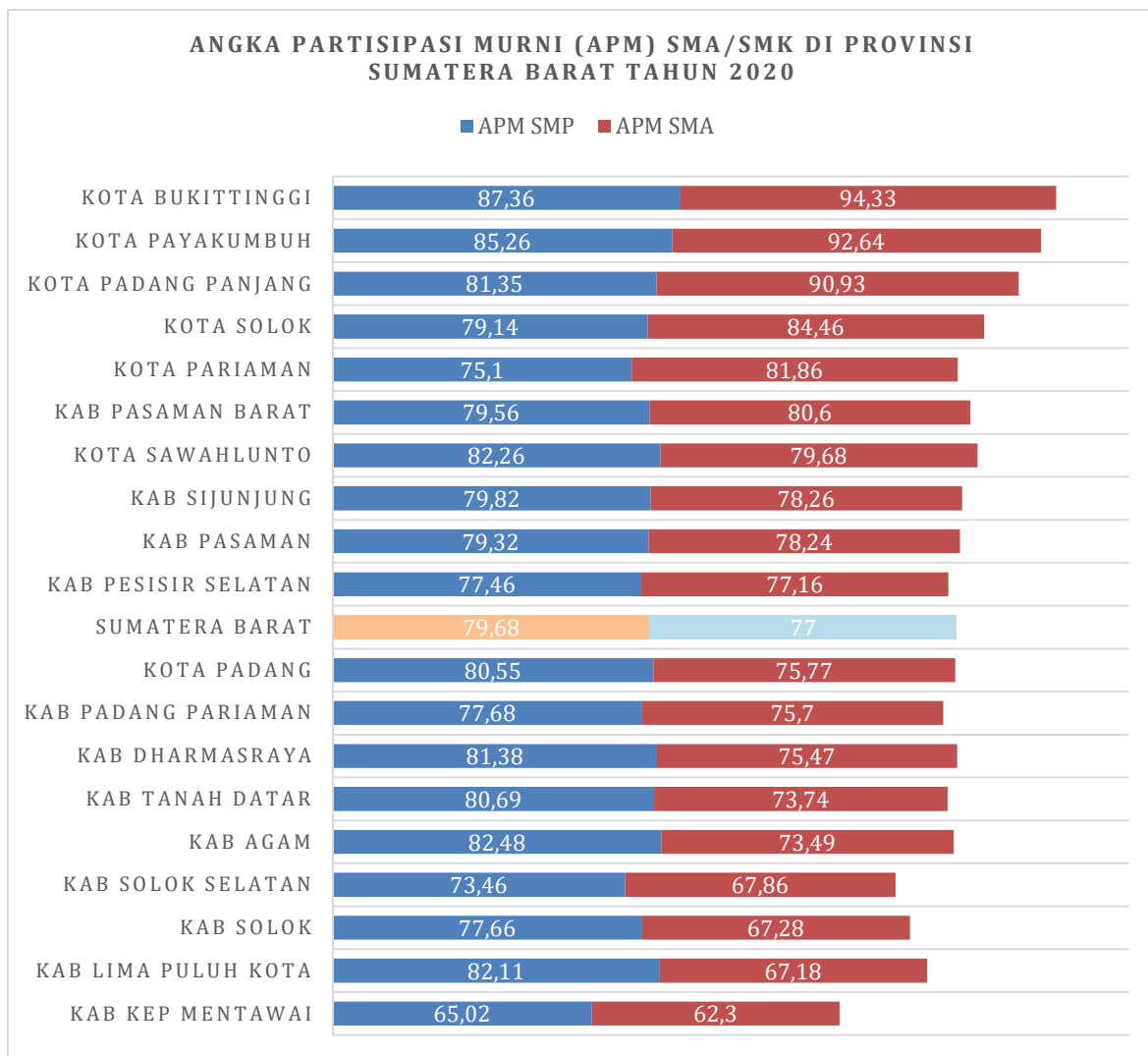
Gambar 1.2. Angka Partisipasi Kasar SMP dan SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota

Gambar 1.2 di atas juga memperlihatkan bahwa angka APK SMA/SMK yang tertinggi itu diraih oleh Kota Bukittinggi yang mencapai 121.04 dan Kota Solok yang mencapai 106.3. sehingga terdapat empat wilayah Kota yang telah memiliki angka APK yang berada di atas rata-rata Sumatera Barat yakni disamping Kota Bukittinggi, Kota solok, juga Kota Payakumbuh dan Kota Padang, sedangkan tiga Kota lainnya yakni Kota Sawahlunto, Kota Pariman dan Kota Padang Panjang berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, terdapat 5 wilayah kabupaten yang sudah memiliki angka APK SMA/SMK diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Mentawai, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan. Sedangkan

terdapat 6 kabupaten yang memiliki angka APK SMA/SMK yang berada di bawah rata-rata APK Sumatera Barat yakni kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar , Solok Selatan, Dharmasraya dan 50 Kota.

Angka partisipasi kasar (APK) ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa mempertimbangkan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika angka APK mencapai 100, Ukuran APK ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep APK ini, maka belum ada kabupaten dan Kota mencapai APK SMA/SMK 100. Hal ini berimplikasi bahwa masih ada penduduk usia sekolah SMA/SMK yang belum duduk dibangku pendidikan SMA/SMK dan gejala ini dominan pada tiga kabupaten yakni, Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan kabupaten 50 Kota.





Gambar 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2020

Gambar 1.3. diatas memperlihatkan angka partisipasi murni (APM) yang menggambarkan persentase penduduk usia SMA/SMK yakni 16-18 tahun yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada. Belum adanya kabupaten dan kota yang mencapai angka APM 100 berarti ada indikasi bahwa masih ada penduduk yang berusia SMA yakni 16-18 tahun yang belum berada di level pendidikan ini. APM yang tertinggi dicapai oleh Kota Bukittinggi yakni 94,33 dan Kota Solok mencapai 75,89. Artinya sebanyak 94,33 % penduduk usia SMA 16-18 tahun yang berada di sekolah menikmati bangku pendidikan, sisanya sebanyak 5,67% masih belum masuk sekolah SMA/SMK. Hal ini dapat disebabkan oleh karena

keterbatasan akses terhadap pendidikan SMA/SMK juga disebabkan karena keterbatasan tempat yang tersedia atau daya tampung yang belum mencukupi, ini tentu perlu didalami lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum rencana strategi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara dengan pengaturan kepentingan pembangunan pendidikan. Dasar hukum pembangunan pendidikan yang diacu tersebut adalah:

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Nomor. 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Dan Riau.
3. UU Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
8. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. PP No. 047 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
10. PP No. 048 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
11. PP No. 074 Tahun 2008 Tentang Guru.
12. PP No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
13. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Dan Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.
15. Permendikbud No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Dan Non Operasional SD/MI/SMP/SMA/SMK.
16. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
17. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
18. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
19. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah.
20. Permendikbud No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
21. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2021.
23. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat.
24. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 68 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) pendidikan provinsi Sumatera Barat dimaksudkan agar Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat memiliki arah pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat
2. Menentukan arah kebijakan, strategi dan indikasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2021-2026.
3. Menyusun indicator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan RI tahun 2021-2026 dan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pendidikan Sumatera Barat

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Bab VIII Penutup

## **BAB II**

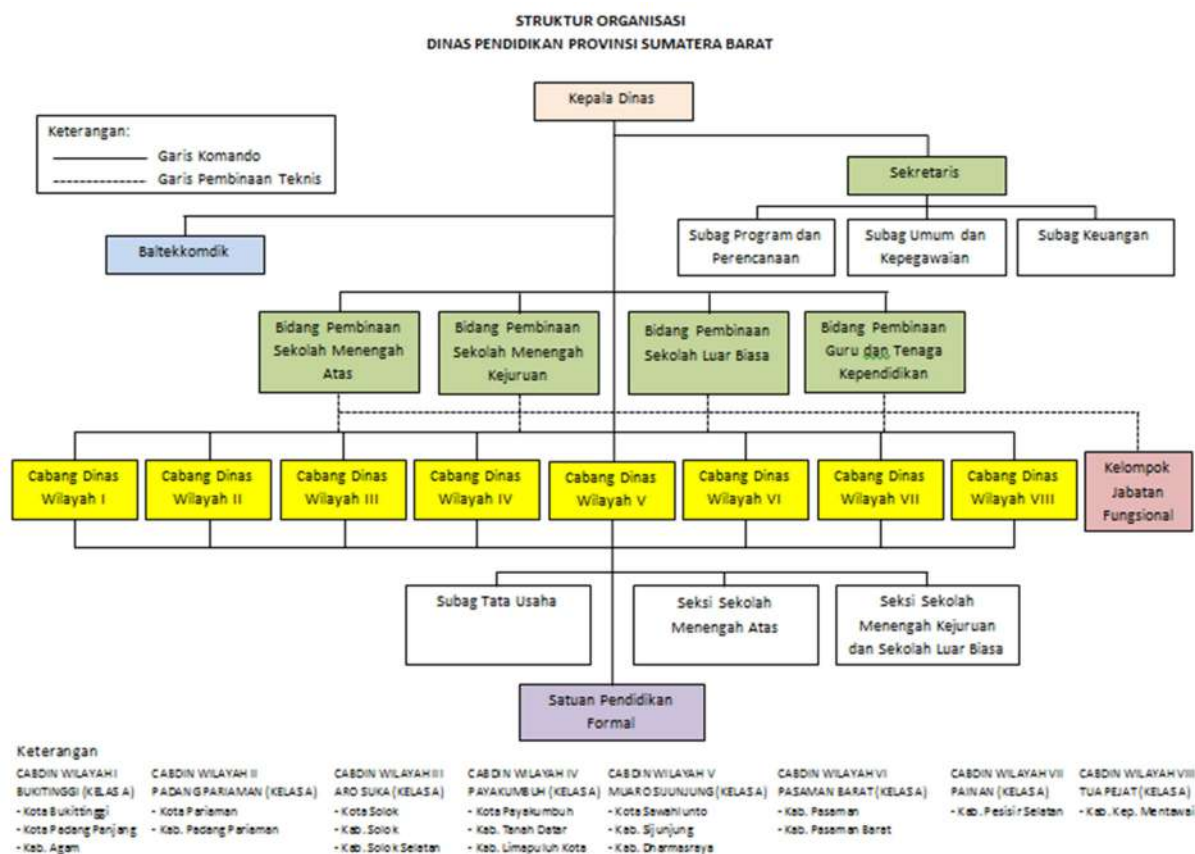
### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

#### **PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada Bab II ini Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat dikemukakan gambaran pelayanan dinas Pendidikan serta kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini agar diperoleh gambaran secara umum berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembangunan di bidang pendidikan di Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.

#### **2.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah sehingga terjadi perubahan bagan struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Pergub Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan diberlakukannya Pergub tersebut sehingga Bagan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

## 2.2 Kondisi Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat

Kondisi pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi (Peraturan Gubernur No:68/Tahun 2020). Fungsi Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan

5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala dinas pendidikan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Mengkoordinasikan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
6. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi ini kemudian organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di susun sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang ada agar organisasi dan kelembagaan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat,
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA),
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
4. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB),
5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),
6. Kelompok Jabatan Fungsional,



7. Cabang Dinas; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yakni sub bagian program dan perencanaan, sub bagian umum dan perlengkapan dan sub bagian keuangan. Bagian Sekretariat memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok ini sekretaris Dinas memiliki sejumlah fungsi yang dapat dilihat secara detil pada Peraturan Gubernur No. 68/2020 tentang tugas pokok dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat 7 tugas pokok untuk sub bagian program dan perencanaan, 13 tugas pokok untuk sub bagian umum dan kepegawaian dan 11 tugas pokok untuk sub bagian keuangan. Sehingga bagian Sekretariat memiliki 31 total tugas pokok.

Adapun Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup dinas;
2. Menyusun konsep rencana strategis dinas;
3. Menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya;
4. Menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
7. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas;
8. Menyusun laporan tahunan kegiatan dinas;
9. Menyusun konsep pembuatan profil pendidikan;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

11. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik negara;
12. Mengelola data dan informasi pendidikan;
13. Menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
14. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tatalaksana;
15. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
16. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
17. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
18. Menyelenggarakan publikasi dan hubungan masyarakat;
19. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
20. Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan;
21. Menyelenggarakan administrasi kearsipan;
22. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan; dan
23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pembinaan sekolah menengah atas (SMA) terdiri dari 3 seksi dengan 11 tugas pokok yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi peserta didik dan seksi sarana prasarana.

Bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) terdiri dari 3 seksi dengan 9 tugas pokok yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi peserta didik dan seksi sarana prasarana.

Adapun tugas pokok pendidikan menengah adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik serta Sarana Prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya ini, bidang pendidikan menengah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan kurikulum dan penilaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan peserta didik dan penguatan karakter;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan sarana prasarana.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa (SLB) terdiri dari 3 seksi dengan 9 tugas pokok yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi peserta didik dan seksi sarana prasarana.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini, maka bidang pembinaan sekolah luar biasa dan pendidikan berkebutuhan khusus ini berfungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan peserta didik bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) terdiri dari 3 seksi dengan 5 tugas pokok yaitu seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan dan seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah luar biasa.

Bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan memiliki tugas pokok menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini, maka bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan ini berfungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan.

2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tentang pembinaan calon kepala sekolah, pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
3. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja penyediaan wadah bagi guru untuk mempublikasikan penulisan karya ilmiah baik cetak maupun elektronik.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas Dinas dibidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini maka Cabang Dinas memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
2. Pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Unit pelaksana teknis memiliki tugas pokok adalah melaksanakan sebahagian tugas teknis dan operasional dinas pendidikan provinsi Sumatera barat sesuai dengan bidangnya, dengan wilayah kerja kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari: Sekretariat, Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan SLB, Pembinaan GTK, Cabang Dinas dan ditambah dengan dua urusan yakni UPTD dan kelompok fungsional, sehingga keseluruhan terdapat 64 tugas pokok di bidang pelayanan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Apabila dikaitkan dengan tema pembangunan pendidikan nasional tahun 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional, kemudian dituangkan dalam visi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat; Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, maka perlu dipertimbangkan bagian dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan yang mengurus peningkatan mutu pendidikan dan kerjasama. Hal ini tentunya sesuai pula dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Upaya pemenuhan standar pendidikan nasional ini bagi pengelola SMA dan SMK tentunya menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, Dinas pendidikan sebagai Pembina SMA dan SMK serta SLB tentunya perlu mengarahkan pembinaannya kepada pencapaian standar pendidikan nasional ini terutama mulai dari standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana pendidikan, bahkan sampai kepada standar pengelolaan pendidikan. Hal ini tentunya tidak dapat diberikan tugas dan tanggungjawab ini kepada lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) saja. Proses menuju kepada perolehan mutu pendidikan yang berstandar nasional tentunya bermula dari tata kelola sekolah itu sendiri. Kelembagaan LPMP lebih kepada upaya memperoleh sertifikasi sekolah

karena telah menjalankan standar nasional pendidikan agar memiliki mutu nasional.

### 2.3 Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sumberdaya dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2020 tercatat sebanyak 12.752 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Golongan dan Eselon Tahun 2020

NO	Gol / Ruang	Eleson				Non Eleson		Jumlah
		I	II	II	IV	Tenaga Fungsional	Staf	
	<b><u>GOLONGAN. IV</u></b>							0
1	Golongan. IV/e						0	0
2	Golongan. IV/d					2	0	2
3	Golongan. IV/c		1			27	0	28
4	Golongan. IV/b			5		1557	2	1564
5	Golongan. IV/a				19	3604	32	3655
	<b>Jumlah Gol. IV</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>5190</b>	<b>34</b>	<b>5249</b>
	<b><u>Golongan. III</u></b>							
1	Golongan III/d				4	2095	117	2216
2	Golongan III/c				0	2046	86	2132
3	Golongan III/b				2	1105	336	1443
4	Golongan III/a				0	211	683	894
	<b>Jumlah Gol. III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5457</b>	<b>1222</b>	<b>6685</b>
	<b><u>Golongan. II</u></b>							
1	Golongan II/d					8	70	78
2	Golongan II/c					10	70	80
3	Golongan II/b					18	204	222
4	Golongan II/a					0	16	16
	<b>Jumlah Gol. II</b>					<b>36</b>	<b>360</b>	<b>396</b>
	<b><u>Golongan. I</u></b>							
1	Golongan I/d						23	23

2	Golongan I/c						6	6
3	Golongan I/b						13	13
4	Golongan I/a						1	1
	<b>Jumlah Gol. I</b>						<b>42</b>	<b>42</b>
	<b>JML TOTAL</b>	-	-	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>10.683</b>	<b>1.658</b>	<b>12.372</b>

Perubahan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan telah dipisahkan dengan urusan kebudayaan yang telah menjadi dinas berdiri sendiri, sehingga telah merampingkan struktur organisasi sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016 dan perda nomor 8 tahun 2016 dinas pendidikan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan Dinas kebudayaan setelah terpisah dari dari pendidikan menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan tipe dinas B.

Selanjutnya aset dan modal yang dimiliki dan dikuasai oleh dinas pendidikan Sumatera Barat adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SLB), jumlah guru dan tenaga kependidikan dari semua sekolah menengah di Sumatera Barat. Hal ini merupakan aset dan modal dalam membangun mutu pendidikan di Sumatera Barat.

#### **2.4 Kinerja Layanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat**

Kinerja layanan Dinas pendidikan mengacu kepada tatakelola sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah khusus (SMK) dan sekolah luar biasa yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari ruangan belajar, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio dan semua para sarana yang mendukung kepada penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang menyenangkan, seperti lingkungan fisik sekolah yang sejuk, nyaman, asri bahkan lingkungan social sekolah yang mendukung kepada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran, empati, rasa solidaritas dan sikap menjunjung tinggi kebinekaan, sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang

majemuk. Disamping itu, kinerja dinas pendidikan juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan selama periode 2016-2020.



Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C	73.35	68.85	71.03	73.27	74.35	72,23	72.77	67.47	72.63	73.13	98.47	105.69	94.99	99.13	98.36
2.	APK SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C	96.88	86.20	86.58	86.96	97.8	84,92	85.23	94.74	95.58	91.7	87.65	98.87	109.42	109.91	93.76
3.	Angka Putus SMA	0.83	0.004	0.003	0.002	0.63		0.77	0.52	0.0019	0.63		57.50		95.00	100
4.	Angka Putus SMK	0.92	0.01	0.01	0	0.73		1.63	1.62	0	0.67				100.00	91.78
5.	Indek integritas UN SMA/SMK		66.57	67.52	68.49	69.47		66.57	67.52	88.24	-		100.00	100.00	128.84	-
6.	Indek Integritas Peserta Didik	66	68.27	71.92	76.34	82		82.61	96.9	76.18	78.68		121.00	134.73	99.79	95.95
7.	Angka Kelulusan SMA/MA/LB /Paket C	97.21	100.83	101.72	102.62	98.25		99.24	99.32	97	98.58		98.42	97.64	94.52	100.34
8.	Angka Kelulusan SMK	97.12	100.49	101.25	102.01	98.15		99.30	99.35	98.76	95.98		98.82	98.12	96.81	97.79
9.	Angka tidak melanjut ke SMA	4.02	4.86	5.31	5.81	2.74		0.27	0.53	2.54	0.45		5.56	9.98	43.72	183.58

No	Indikator Kinerja Utama	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Kompetensi tenaga kependidikan / UKG	59.93	74.02	75.80	77.62	80.93		74.02	75.80	87	89.50		100.00	100.00	112.08	110.59
11.	Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	72.23	85.07	85.96	86.65	78.18		85.07	85.96	89.24	77.16		100.00	100.00	102.99	98.70
12.	Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	72.23	61.32	65.82	71.15	78.18		61.32	65.82	99	51.63		100.00	100.00	139.14	66.04
13.	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	42.98	44.99	48.08	51.38	50		42.77	43.56	42.16	27.13		95.07	90.60	82.06	54.26
14.	Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	28	27.71	28.79	29.92	50		32	28	46.12	27.59		115.48	97.26	154.14	55.18
15.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja		58.51	58.52	B	B	72,48	58.51	58.51 (CC)	58.52 (CC)	60.84 (B)					100

## 2.5 Data Pendidikan

Untuk pengukuran mutu pendidikan ini telah dilakukan proses pemenuhan standar nasional pendidikan ini, yang dilakukan dari sekolah, dimana proses pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (SNP), dilakukan input secara aplikasi yang dilakukan oleh sekolah dan diverifikasi dan divalidasi oleh masing-masing pengawas satuan pendidikan dan nantinya akan terekapitulasi secara nasional pada server rapor mutu Kemdikbud di Jakarta.

Hasil rapor mutu yang diperoleh ini akan dijadikan salah satu pedoman untuk perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan untuk rencana pembangunan pendidikan daerah khususnya Sumatera Barat. Untuk penilaian dan kategori capaian dari rapor mutu ini telah ditetapkan standar secara nasional seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Kategori Capaian Rapor Mutu

	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
□	Menuju SNP 1	0	2,04
□□	Menuju SNP 2	2,05	3,7
□□□	Menuju SNP 3	3,71	5,06
□□□□	Menuju SNP 4	5,07	6,66
□□□□□	SNP	6,67	7

Untuk Tahun 2020 pencapaian rapor mutu untuk SMA, SMK dan SLB didapat sebagai berikut :

Tabel 2.4. Capaian Rapor Mutu Satuan Tingkat Pendidikan  
Prov. Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Standar Nasional Pendidikan	SMA	SMK	SLB
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,82	6,97	6,99
2	Standar Isi	5,11	6,89	3,74
3	Standar Proses	5,23	6,97	4,17
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,01	6,97	1,97
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,94	4,46	4,88
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,98	5,21	3,03
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,76	6,90	4,12
8	Standar Pembiayaan	5,61	6,63	3,64

Dari hasil rapor mutu seperti tabel diatas, terdapat banyak perbedaan antara satuan pendidikan yang diukur yakni : SMA, SMK dan SLB dimana dapat dilihat ada kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Ada yang telah mencapai SNP, Menuju SNP 1, Menuju SNP 2, Menuju SNP 1. Analisa pengukuran selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurai dan mengukur sub indikator dari indikator SNP diatas, sehingga didapat pencapaian dari indikator masing satuan pendidikan.

Tabel 2.5. Data Sumber Daya Manusia Pendidikan Menengah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Variabel	SMA	SMK	SLB
1	Sekolah	330	213	153
2	Kelas	5147	3.048	x
3	Siswa Baru	68.548	41.144	x
4	Siswa	149.939	92.161	6.632
5	Lulusan	47.217	26.439	x
6	Guru	11.077	7.554	1.357

Pada tabel diatas merupakan hasil rekapitulasi dari Data Pokok Pendidikan tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2020. Dari data pokok tersebut didapatlah hasil perhitungan berdasarkan indikator kinerja yang menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini agar diperoleh gambaran secara umum berbagai kendala dan

hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembangunan di bidang pendidikan di Sumatera Barat.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,86	14,02	94,35
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,85	8,99	101,58
3	APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	%	73,3	74,35	101,43
4	Angka Putus SMA	%	0,63	0,63	100,00
5	Angka Putus SMK	%	0,73	0,67	91,78
6	Angka kelulusan SMA	%	98,25	98,58	100,34
7	Angka kelulusan SMK	%	98,15	95,98	97,79

Data dikdasmen yang disajikan diuraikan menjadi 13 variabel data pada tahun 2013/2014. Sebanyak 7 variabel pertama adalah prasarana yang terdiri dari sekolah, rombongan belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium, sedangkan 6 variabel berikutnya adalah sumber daya manusia seperti siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan putus sekolah.

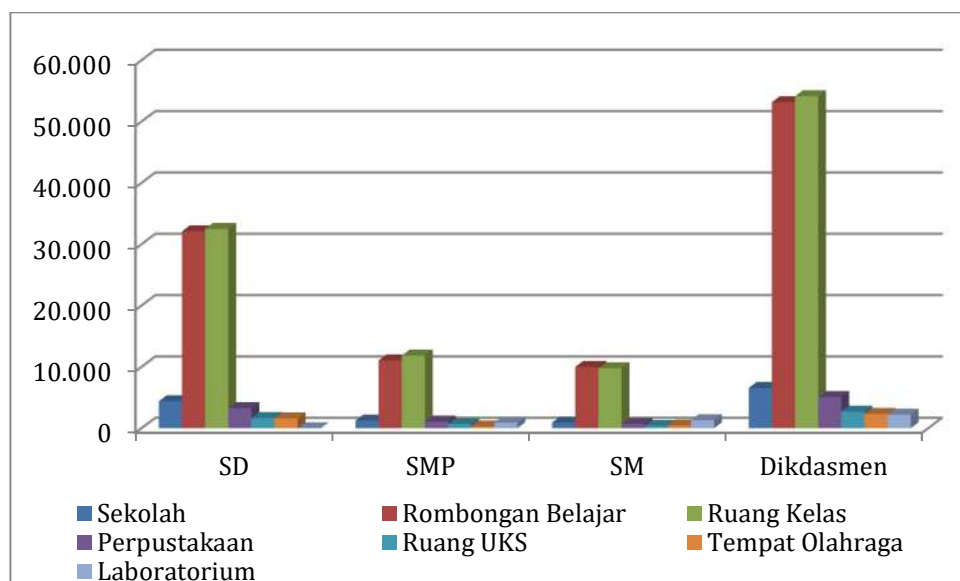
Tabel 2.7. Data Prasarana Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Sekolah	4,401	1,243	921	6,565
2	Rombongan Belajar	32,102	11,061	9,998	53,161
3	Ruang Kelas	32,501	11,855	9,778	54,134
4	Perpustakaan	3,290	1,088	700	5,078
5	Ruang UKS	1,665	667	377	2,709
6	Tempat Olahraga	1,609	287	442	2,338
7	Laboratorium	0	901	1,306	2,207

Berdasarkan Tabel 2.7. di Sumatera Barat terdapat jumlah sekolah dikdasmen sebesar 6565 buah dengan sekolah terbesar adalah jenjang

SD sebesar 4401 sekolah dan terkecil adalah jenjang SM sebesar 921 sekolah. Seperti satuan pendidikan di kabupaten/kota lainnya, ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlah satuan pendidikan yang ada jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Grafik 2.1. Prasarana Sekolah Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat



Tabel 2.8. Data Sumber Daya Manusia Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat

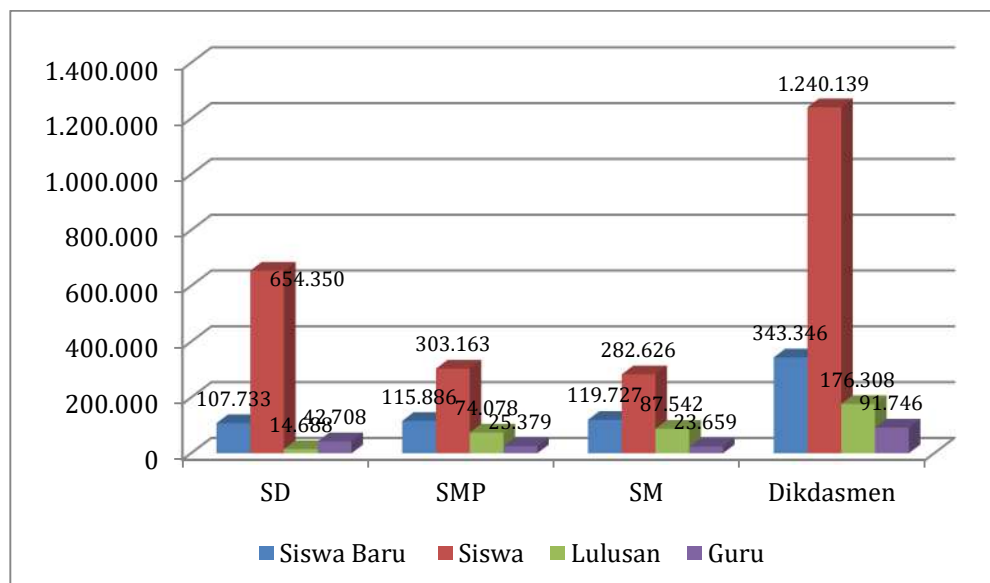
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Siswa Baru	107,733	115,886	119,727	343,346
2	Siswa	654,350	303,163	282,626	1,240,139
3	Lulusan	14,688	74,078	87,542	176,308
4	Guru	42,708	25,379	23,659	91,746
5	Mengulang	16,261	1,973	1,861	20,095
6	Putus Sekolah	1,327	740	1,580	3,647

Pada Tabel 2.7. dan 2.8. diketahui bahwa untuk menampung siswa jenjang SD sebesar 654.350, tersedia 4.401 sekolah dan 32.501 ruang kelas serta rombongan belajar sejumlah 32.102. Hal yang sama untuk menampung siswa jenjang SMP sebesar 303.163 orang, tersedia 1.243 sekolah dan 11.855 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 11.061. Untuk menampung siswa jenjang SM sebesar 282.626

orang, tersedia sebesar 921 sekolah dan 9.778 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 9.998. Dengan demikian, untuk dikdasmen telah menampung sebanyak 1.240.139 orang di 6.565 sekolah dan 54.134 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 53.161.

Dari Tabel 2.7. juga diketahui ruang kelas jenjang SM lebih kecil jika dibandingkan dengan rombongan belajar yang ada, sedangkan jenjang SMP dengan kondisi sebaliknya. Bila satu rombongan belajar harus menggunakan satu ruang kelas maka masih terdapat kekurangan ruang kelas. Kondisi di Sumatera Barat seperti disajikan pada Tabel 3.3, untuk jenjang SD kelebihan 399 ruang kelas, jenjang SMP kelebihan 794 ruang kelas, dan jenjang SM kekurangan 220 ruang kelas, sehingga untuk dikdasmen kelebihan 973 ruang. Terjadinya kekurangan ruang kelas di jenjang SM tersebut hendaknya dipenuhi dalam rangka meningkatkan akses yang merata, sehingga Misi 2 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Strategi Kemendikbud 2019. Sebaliknya, jenjang pendidikan SD yang kelebihan ruang kelas tidak dibiarkan kosong dan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh semua anak yang belum bersekolah agar bersekolah, sehingga Misi 2 akses yang meluas dapat tercapai sesuai dengan Rencana Strategi Kemendikbud 2019.

Grafik 2.2. Sumber Daya Manusia Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat



Tabel 2.9. Kekurangan dan kelebihan Prasarana Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Ruang Kelas	(399)	(794)	220	(973)
2	Perpustakaan	1,111	155	221	1,487
3	Ruang UKS	2,736	576	544	3,856
4	Tempat Olahraga	2,792	956	479	4,227
5	Laboratorium	4,401	342	-385	4,358

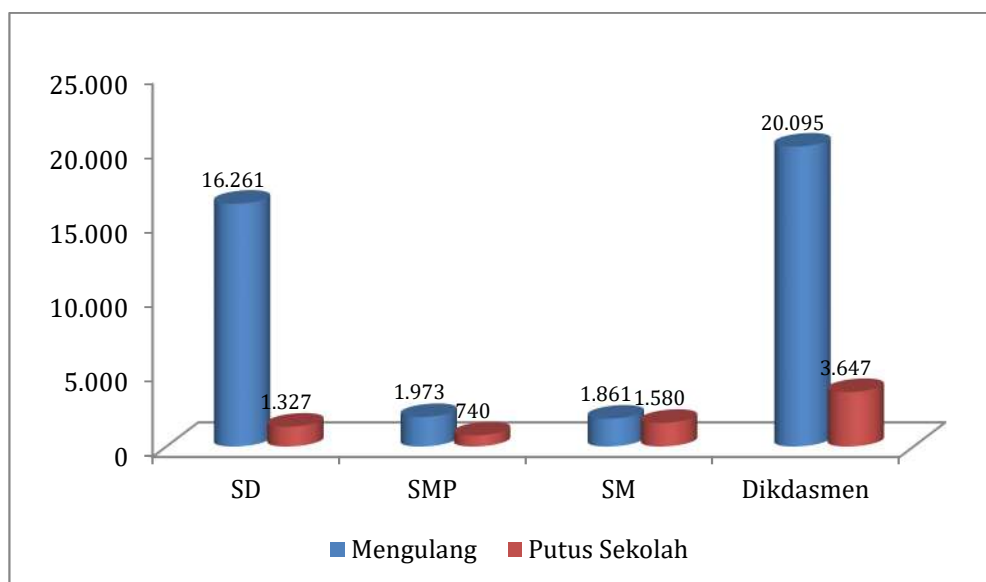
Hal yang sama untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. Bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium (khusus SM sebanyak 5 jenis laboratorium) maka di semua jenjang pendidikan masih terdapat kekurangan/kelebihan perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium. Berdasarkan pada Tabel 3.3. maka untuk jenjang SD Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan 1.111 perpustakaan, jenjang SMP kekurangan 155 perpustakaan, dan jenjang SM kekurangan 221 perpustakaan, sehingga dikdasmen masih kekurangan 10478 perpustakaan. Demikian juga dengan ruang UKS, jenjang SD kekurangan 2.736 ruang UKS, jenjang SMP kekurangan 576 ruang UKS, dan jenjang SM kekurangan 544 ruang UKS, sehingga dikdasmen kekurangan 3.856 ruang UKS. Hal yang sama dengan tempat olahraga, jenjang SD masih kekurangan 2.792 ruang, jenjang SMP masih kekurangan 956 ruang, dan jenjang SM kekurangan 479 ruang, sehingga dikdasmen kekurangan 4.227 ruang. Untuk laboratorium, jenjang SD masih kekurangan 4.401 laboratorium, jenjang SMP masih kekurangan 342 laboratorium dan jenjang SM kelebihan 385 laboratorium sehingga dikdasmen kekurangan 4.358 laboratorium.

Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah yang terdapat pada Tabel 2.8. dan Grafik 2.3. ternyata di Sumatera Barat mengulang terbesar pada jenjang SD sebesar 16.261 orang sedangkan mengulang terkecil pada jenjang SM sebesar 1.861 orang sehingga jumlah mengulang di dikdasmen menjadi sebesar 20.095 orang. Putus sekolah yang terbesar terdapat pada jenjang SM sebesar 1.580 orang



sedangkan putus sekolah terkecil pada jenjang SMP sebesar 740 orang sehingga jumlah putus sekolah dikdasmen menjadi sebesar 3.647 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada jenjang SD harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada jenjang SM hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket A/B/C dalam rangka peningkatan mutu di tingkat SD/SMP/SM.

Grafik 2.3. Mengulang dan Putus Sekolah Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat



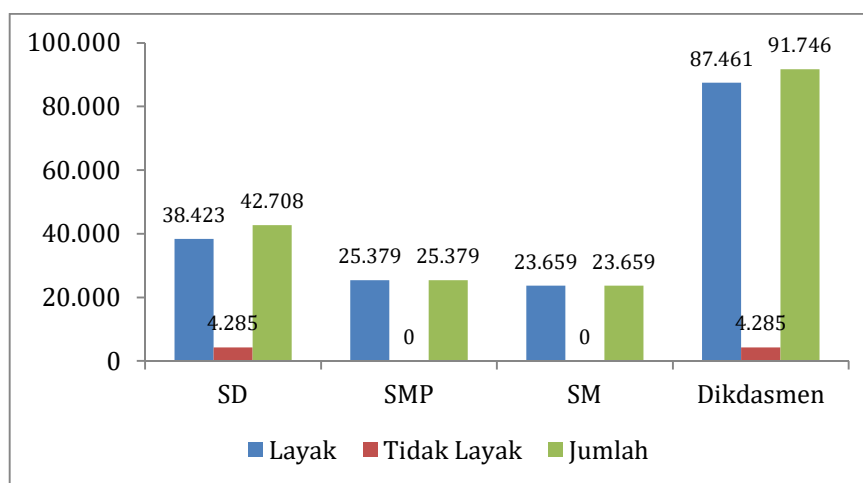
Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SD, SMP dan SM adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 2.10. dan Grafik 2.4. Jumlah guru di Sumatera Barat layak mengajar yang terbaik terdapat di jenjang SMP sebesar 25.739 orang, sedangkan guru layak terkecil terdapat di jenjang SM sebesar 23.659 orang. Kecilnya guru layak di jenjang SD karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II. Sebaliknya, guru yang

tidak layak mengajar terbesar di jenjang SD sebesar 4.285 orang. Dengan demikian, untuk dikdasmen terdapat guru layak mengajar sebesar 87.461 orang dan tidak layak sebesar 4.285 orang. Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005.

Tabel 2.10. Guru menurut Kelayakan Mengajar Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Layak	38,423	25,379	23,659	87,461
2	Tidak Layak	4,285	0	0	4,285
	Jumlah	42,708	25,379	23,659	91,746
1	% Layak	89.97	100.00	100.00	95.33
2	% Tidak Layak	10.03	-	-	4.67

Grafik 2.4. Guru menurut Kelayakan Mengajar Provinsi Sumatera Barat



Tabel 2.11. Ruang Kelas menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

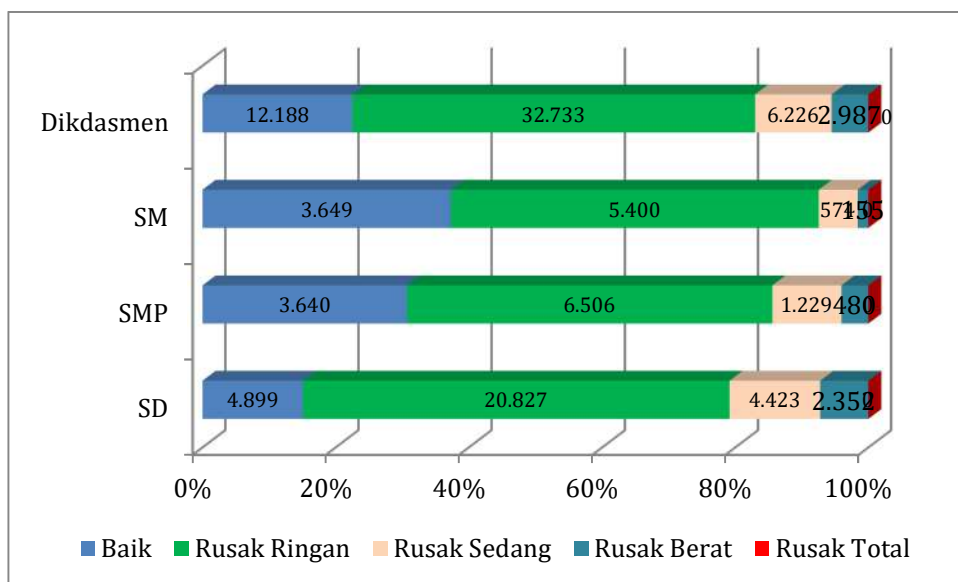
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	4,899	3,640	3,649	12,188
2	Rusak Ringan	20,827	6,506	5,400	32,733
3	Rusak Sedang	4,423	1,229	574	6,226
4	Rusak Berat	2,352	480	155	2,987
5	Rusak Total	0	0	0	0
	Jumlah	32,501	11,855	9,778	54,134
1	% Baik	15.07	30.70	37.32	22.51
2	% Rusak Ringan	64.08	54.88	55.23	60.47
3	% Rusak Sedang	13.61	10.37	5.87	11.50
3	% Rusak Berat	0.00	0.00	0.00	0.00
5	% Rusak Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam lima kondisi, yaitu baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 2.11. dan Grafik 2.5. Berdasarkan ruang kelas di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas baik terbesar di jenjang SD ruang, sedangkan ruang kelas yang baik terkecil di jenjang SMP sebesar 3.640 ruang. Untuk jumlah ruang kelas rusak ringan yang terbesar di jenjang SD sebesar 20.827 ruang, sedangkan ruang kelas rusak ringan yang terkecil di jenjang SM sebesar 5.400 ruang. Jumlah ruang kelas rusak sedang yang terbesar di jenjang SD sebesar 4.423 ruang, sedangkan ruang kelas rusak sedang yang terkecil di jenjang SM sebesar 574 ruang. Jumlah ruang kelas rusak berat yang terbesar di jenjang SD sebesar 2.352 ruang, sedangkan ruang kelas rusak berat yang terkecil di jenjang SM sebesar 155 ruang. Sebaliknya, ruang kelas rusak total tidak ada di semua jenjang.

Jadi, untuk dikdasmen terdapat ruang kelas seluruhnya sebesar 54.134 ruang dengan rincian ruang kelas baik sebesar 12.188 ruang, rusak ringan sebesar 32.733 ruang, rusak sedang sebesar 6.226 ruang, rusak berat sebesar 2.987 ruang, dan rusak total tidak ada. Dengan kondisi seperti ini berarti, sebagian sekolah masih membutuhkan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas dengan jumlah yang bervariasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan makin tinggi jenjang pendidikan ternyata makin baik prasarana yang dimiliki. Hal ini dapat dimaklumi karena letak sekolah jenjang SD banyak yang berada di daerah pinggiran dan yang sulit dijangkau.

Grafik 2.5. Ruang Kelas Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat



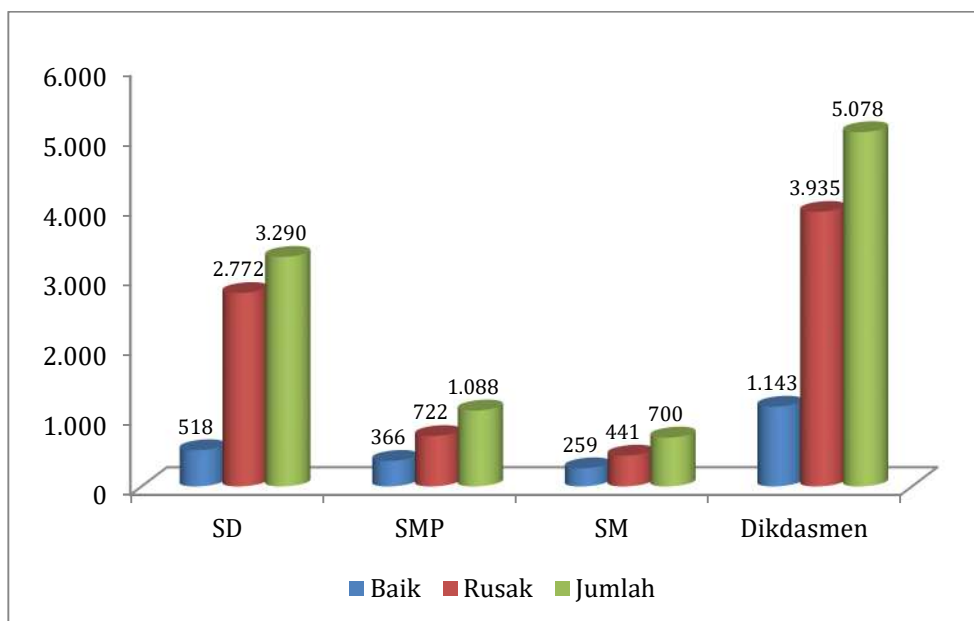
Tabel 2.12. Perpustakaan menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	518	366	259	1,143
2	Rusak	2,772	722	441	3,935
	Jumlah	3,290	1,088	700	5,078
1	% Baik	15.74	33.64	37.00	22.51
2	% Rusak	84.26	66.36	63.00	77.49

Prasarana sekolah yang juga penting adalah perpustakaan terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 2.12. dan Grafik 2.6. Berdasarkan perpustakaan di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki perpustakaan yang rusak. Jumlah perpustakaan yang baik terkecil di jenjang SM sebesar 37 % atau 259 perpustakaan, sedangkan perpustakaan yang baik terbesar di jenjang SD besar 15.74 % atau 518 perpustakaan. Hal yang sama untuk jumlah perpustakaan yang rusak terbesar di jenjang SD sebesar 84.26 % atau 2.772 Perpustakaan, sedangkan perpustakaan yang rusak terkecil di jenjang SM sebesar 63 %

atau 441 perpustakaan.

Grafik 2.6. Perpustakaan Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat



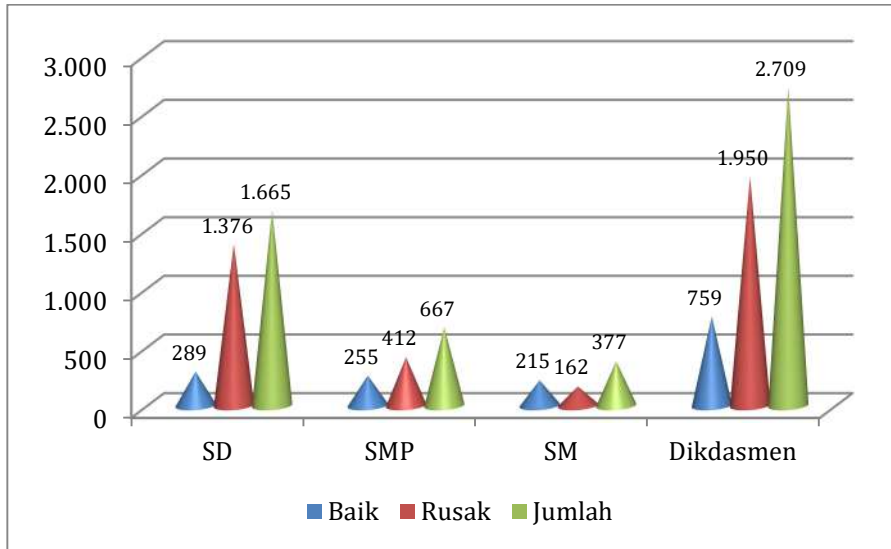
Tabel 2.13. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	289	255	215	759
2	Rusak	1,376	412	162	1,950
	Jumlah	1,665	667	377	2,709
1	% Baik	17.36	38.23	57.03	28.02
2	% Rusak	82.64	61.77	42.97	71.98

Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (Permendikbud 23/2013) adalah ruang UKS juga terbagi dalam kondisi baik dan rusak yang terdapat pada Tabel 2.13. dan Grafik 2.7. Berdasarkan ruang UKS di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki ruang UKS yang rusak. Jumlah ruang UKS baik terbesar di jenjang SD sebesar 289 ruang, sedangkan ruang UKS baik terkecil di jenjang SM sebesar 215 ruang. Hal yang sama untuk jumlah ruang UKS rusak terbesar di jenjang SD sebesar 1.376 ruang, sedangkan ruang UKS rusak terkecil di jenjang SM sebesar 377

ruang.

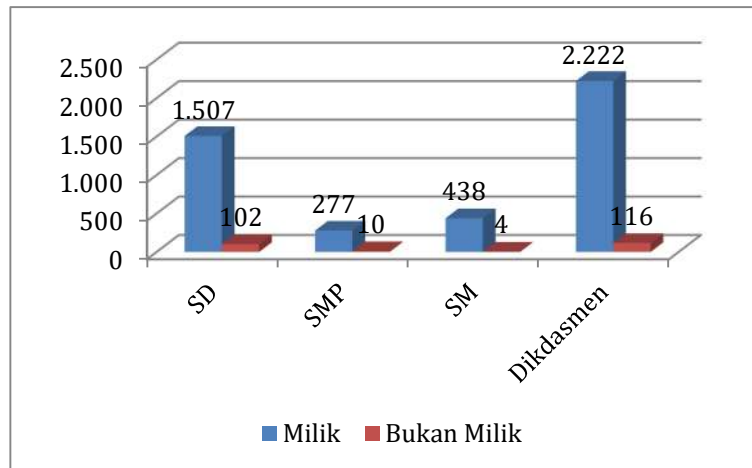
Grafik 2.7. Ruang UKS Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat



Tabel 2.14. Tempat Olahraga Menurut Kepemilikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Milik	1,507	277	438	2,222
2	Bukan Milik	102	10	4	116
	Jumlah	1,609	287	442	2,338
1	% Baik	93.66	96.52	99.10	95.04
2	% Rusak	6.34	3.48	0.90	4.96

Grafik 2.8. Tempat Olahraga Menurut Kepemilikan Provinsi Sumatera Barat

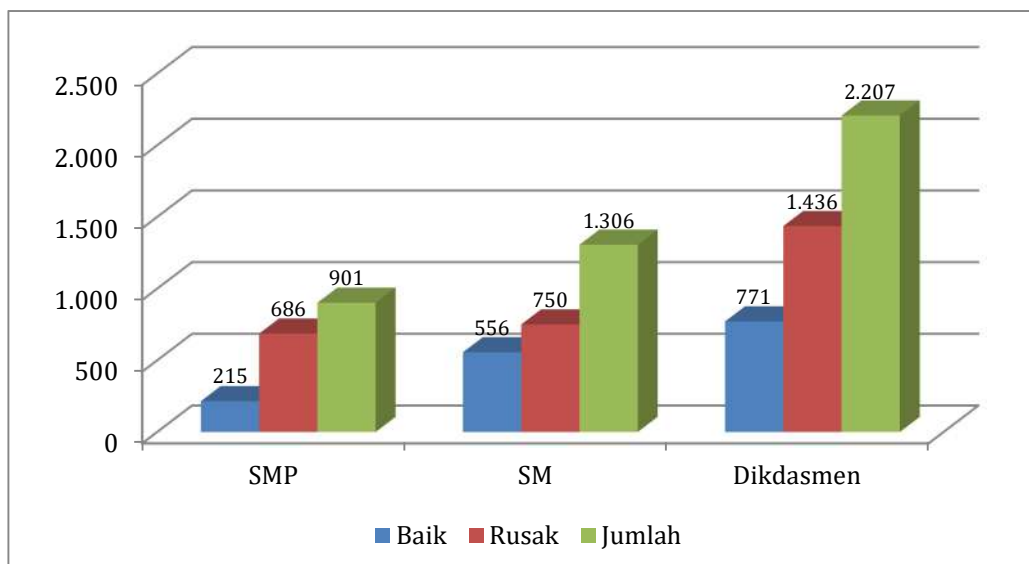


Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Permendikbud 23/2013 adalah tempat olahraga menurut kepemilikan terbagi dalam milik dan bukan milik yang terdapat pada Tabel 2.14. dan Grafik 2.8. Berdasarkan tempat olahraga di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki tempat olahraga yang bukan milik. Jumlah tempat olahraga milik terbesar di jenjang SD sebesar 1.507 tempat, sedangkan tempat olahraga milik terkecil di jenjang SMP sebesar 277 tempat. Hal yang sama untuk jumlah tempat olahraga bukan milik terbesar di jenjang SD sebesar 102 tempat, sedangkan tempat olahraga bukan milik terkecil di jenjang SM yang rusak sebesar 4 tempat.

Tabel 2.15. Laboratorium Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	215	556	771
2	Rusak	686	750	1,436
	Jumlah	901	1,306	2,207
1	% Baik	23.86	42.57	34.93
2	% Rusak	76.14	57.43	65.07

Grafik 2.9. Laboratorium Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat



Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Permendikbud 23/2013 adalah laboratorium juga terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 2.15. dan Grafik 2.9. Berdasarkan

laboratorium di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki laboratorium yang rusak. Jumlah laboratorium baik terkecil di jenjang SMP sebesar 215 laboratorium, sedangkan laboratorium baik terbesar di jenjang SM sebesar 556 laboratorium. Hal yang sama untuk jumlah laboratorium rusak terbesar di jenjang SM sebesar 750 laboratorium, sedangkan laboratorium rusak terkecil di jenjang SMP sebesar 686 laboratorium.



Tabel 2.16. Data Sekolah Menengah Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SMA	SMK	MA	SLB	Paket C	Jumlah
1	Sekolah	332	214	223	152	x	921
	a. Negeri	236	114	48	29	x	427
	b. Swasta	96	100	175	123	x	494
	Sekolah Berakreditasi	332	214	223	152	x	650
	a. Akreditasi A	185	26	33	8	x	252
	b. Akreditasi B	58	82	39	23	x	202
	c. Akreditasi C	39	60	71	26	x	196
	d. Tidak Terakreditasi	1	8	5	1	x	15
	e. Belum Diakreditasi	49	38	75	94	x	256
2	Siswa baru	67,718	41,105	10,904	x	x	119,727
3	Siswa menurut usia sekolah	137,958	84,856	23,729	6,894	3,512	256,949
	a. <16 tahun	1,316	755	176	6,000	112	8,359
	b. 16-18 tahun	102,150	54,843	15,511	741	2,639	175,884
	c. >18 tahun	34,492	29,258	8,042	153	761	72,706
	Siswa menurut jenis kelamin	137,958	84,856	23,729	6,894	3,512	256,949
	a. laki-laki	57,147	53,119	9,628	3,365	2,201	125,460
	< 16 tahun	542	505	59	2,678	103	3,887
	- usia 16-18 tahun	40,003	34,011	5,767	612	1,517	81,910
	> 18 tahun	16,602	18,603	3,802	75	581	39,663
	b. perempuan	80,811	31,737	14,101	3,529	1,311	131,489
	< 16 tahun	774	250	117	3,322	9	4,472
	- usia 16-18 tahun	62,147	20,832	9,744	129	1,122	93,974
	> 18 tahun	17,890	10,655	4,240	78	180	33,043
	Siswa menurut status sekolah	137,958	84,856	23,729	6,894	x	253,437
	a. Negeri	131,412	72,711	19,121	2,067	x	225,311

	b. Swasta	6,546	12,145	4,608	4,827	x	28,126
	Siswa menurut tingkat	137,958	84,856	23,729	x	x	246,543
	a. Kelas 10	50,658	35,623	11,879	x	x	98,160
	b. Kelas 11	48,798	29,849	10,376	x	x	89,023
	c. Kelas 12	38,502	19,384	1,474	x	x	59,360
	Siswa menurut tingkat th 2018/2019	146,203	89,101	27,831	x	x	263,135
	a. Kelas 10	51,031	31,883	9,425	x	x	92,339
	b. Kelas 11	47,193	28,808	8,418	x	x	84,419
	c. Kelas 12	47,979	28,410	9,988	x	x	86,377
4	Mengulang	1,243	564	54	x	x	1,861
	a. Kelas 10	875	376	0	x	x	1,251
	b. Kelas 11	363	166	47	x	x	576
	c. Kelas 12	5	22	7	x	x	34
5	Putus sekolah	652	571	14	x	x	1,237
	a. Kelas 10	397	409	0	x	x	806
	b. Kelas 11	143	86	5	x	x	234
	c. Kelas 12	112	76	9	x	x	197
6	Lulusan	47,217	26,439	7,277	x	2,892	83,825
7	KS dan Guru menurut Ijazah	11,001	7,279	2,911	1,295	188	22,674
	a. Ijazah < S1	1,456	787	184	310	53	2,790
	b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	9,545	6,492	2,727	985	135	19,884
	KS dan Guru menurut status kepegawaian	11,001	7,279	2,911	1,295	188	22,674
	a. PNS	6,455	5,841	1,334	554	47	14,231
	b. Non-PNS	4,546	1,438	1,577	741	141	8,443
	KS dan Guru menurut sertifikasi	11,001	7,279	2,911	1,295	188	22,674

	a. Sudah	6,609	4,240	613	554	56	12,072
	b. Belum	4,392	3,039	2,298	741	132	10,602
8	Rombongan belajar (Kelas)	4,943	3,418	1,390	x	247	9,998
9	Ruang kelas	5,334	3,168	1,276	x	x	9,778
	a. Baik	1,430	1,259	960	x	x	3,649
	b. Rusak ringan	3,379	1,788	233	x	x	5,400
	c. Rusak Sedang	442	82	50	x	x	574
	d. Rusak Berat	83	39	33	x	x	155
	e. Rusak Total	0	0	0	x	x	0
10	Perpustakaan	332	205	163	x	x	700
	a. Baik	94	49	116	x	x	259
	b. Rusak	238	156	47	x	x	441
11	Ruang UKS	187	78	112	x	x	377
	a. Baik	101	28	86	x	x	215
	b. Rusak	86	50	26	x	x	162
13	Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)	287	136	19	x	x	442
	a. Milik	287	136	15	x	x	438
	b. Bukan Milik	0	0	4	x	x	4
14	Laboratorium *)	584	422	266	x	x	1,272
	a. Baik	213	99	221	x	x	533
	b. Rusak	371	323	45	x	x	739
15	Ruang praktik gambar teknik SMK	x	34	x	x	x	34
	a. Baik	x	23	x	x	x	23
	b. Rusak	x	11	x	x	x	11

\*) Laboratorium terdiri dari Biologi, Fisika, IPA, Komputer, dan Bahasa

Tabel 2.17. Indikator Pendidikan SM untuk Verifikasi Data

No.	Variabel	SMA	SMK	MA	SMALB	Paket C	Rata-rata	Kriteria
1	Siswa per Sekolah	416	397	106	45	-	279	di luar 216-432
	Siswa per Sekolah Negeri	557	638	398	71	-	528	
	Siswa per Sekolah Swasta	68	121	26	39	-	57	
2	Siswa per Kelas	28	25	17	-	14	26	di luar 20-36
3	Kelas per Ruang Kelas	0.93	1.08	1.09	-	-	1.02	>1
4	Kelas per Sekolah	14.89	15.97	6.23	-	-	10.86	<12
5	Kelas per Guru	0.45	0.47	0.48	-	1.31	0.44	<0.4
6	Siswa per Guru	13	12	8	5	19	11	>12
7	Guru per Sekolah	33	34	13	9	-	25	<22
8	% SB per Siswa	49.09	48.44	45.95	-	-	46.60	di luar 31-35
9	% Lls per Siswa	34.23	31.16	30.67	-	-	32.62	di luar 30-34
10	Angka Mengulang	0.85	0.63	0.19	-	-	0.71	>2
	a. Kelas 7	1.71	1.18	-	-	-	1.35	
	b. Kelas 8	0.77	0.58	0.56	-	-	0.68	
	c. Kelas 9	0.01	0.08	0.07	-	-	0.04	
11	Angka Putus Sekolah	0.45	0.64	0.05	-	-	0.47	>2
	a. Kelas 7	0.78	1.28	-	-	-	0.87	

No.	Variabel	SMA	SMK	MA	SMALB	Paket C	Rata-rata	Kriteria
	b. Kelas 8	0.30	0.30	0.06	-	-	0.28	
	c. Kelas 9	0.23	0.27	0.09	-	-	0.23	
12	% Siswa usia sek thd seluruhnya	74.04	64.63	65.37	10.75	75.14	68.45	di luar 80-90
	a. Laki-laki	70.00	64.03	59.90	18.19	68.92	65.29	
	b. Perempuan	76.90	65.64	69.10	3.66	85.58	71.47	
13	Perkembangan Siswa mnr tingkat	0.94	0.95	0.85	-	-	0.94	<1
	a. Kelas 10	0.99	1.12	1.26	-	-	1.06	
	b. Kelas 11	1.03	1.04	1.23	-	-	1.05	
	c. Kelas 12	0.80	0.68	0.15	-	-	0.69	

## **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan berdasarkan pilar penyelenggaraan pendidikan yang telah dicanangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan selama ini. Yakni pilar peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, tantangan dan peluang terhadap kondisi guru dan tenaga kependidikan. Tantangan terhadap kondisi efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, tantangan dan peluang penyelenggaraan pendidikan berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan Sumatera Barat.

## **2.7 Kondisi Implementasi pendidikan karakter layanan pendidikan**

Pendidikan karakter layanan pendidikan merupakan konsep pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang terbentuk sebagai hasil dari proses internalisasi berbagai nilai-nilai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak peserta didik di lingkungan social dan alamiahnya (Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen dikmen Kemendiknas, 2016). Sehingga dalam membangun budaya dan karakter bangsa Indonesia, maka dirumuskan 18 nilai dan sikap yang menjadi landasan karakter siswa sebagai luaran dari layanan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai itu adalah:

1. Relegius
2. Jujur
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja Keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa Ingin Tahu

10. Semangat Kebangsaan
11. Cinta Tanah Air
12. Menghargai Prestasi
13. Bersahabat/Komunikatif
14. Cinta Damai
15. Gemar Membaca
16. Peduli Lingkungan
17. Peduli Social
18. Tanggung Jawab

Semua nilai karakter kepribadian bangsa ini harus tercermin dalam standar kelulusan (SKL) siswa di SMA dan SMK di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat dilakukan apabila sekolah SMA dan SMK sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 di setiap sekolahnya. Sehingga pada setiap mata pelajaran sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter unggul di atas pada system pembelajarannya, yang pada gilirannya akan membentuk dan melahirkan budaya sekolahnya sendiri. Setiap sekolah harus mampu mengembangkan karakternya dari ke delapan belas nilai-nilai inti budaya bangsa di atas dengan mengembangkan nilai-nilai karakter masing-masing melalui proses pembelajaran baik yang bersifat kurikulum maupun yang non kurikulum.

Data empiris untuk upaya sekolah mengimplementasikan pendidikan karakter akan terlihat dari usaha untuk memenuhi standar mutu pendidikan nasional (SNP) yang dibuktikan dengan terpenuhinya standar pendidikan nasional yang diawali dengan penetapan SKL, standar isi, standar proses, sarana dan prasarana, standar guru tenaga pendidik, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di sekolah melalui pengajuan akreditasi sekolah, sehingga diyakini, apabila sekolah sudah mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat akreditasi A dan B bahkan C, berarti pendidikan karakter sudah mulai dibangun dan dikembangkan di sekolah ini melalui perumusan nilai-nilai inti yang dianut oleh warga sekolah menuju sekolah berkualitas dan unggul. Berikut gambaran

sekolah sekolah yang telah melakukan akreditasi untuk standar mutu pendidikannya di Sumatera Barat.

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tentunya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan social di tengah masyarakat, karena sekolah merupakan bagian dari system kelembagaan social yang menjadi barometer bagi terjadinya proses internalisasi nilai-nilai budaya di tengah masyarakat. Apabila kejadian tindak pidana di tengah masyarakat masih terus meningkat, maka dapat dikatakan institusi pendidikan seperti sekolah ini menjadi kunci untuk mengontrol terjadinya kejadian tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk mengurangi tindak kejadian pidana di tengah masyarakat maka pendidikan karakter di sekolah yang pada gilirannya akan tertular dalam pergaulan di tengah masyarakat akan berdampak menjadi lebih baik, sehingga kejadian tindak pidana akan berkurang dengan sendirinya. Hal ini merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, karena warga sekolah merupakan contoh perilaku tauladan di tengah masyarakat baik melekat pada diri guru dan siswanya di tengah lingkungan sosialnya.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT**

Pada bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pendidikan, telaahan visi, misi dan program dinas pendidikan, dan telaahan renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

### **3.1 Identifikasi permasalahan**

Pembangunan pendidikan di Sumatera Barat akan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga Disdik Sumatera Barat dapat mendorong penguatan layanan pendidikan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun bentuk permasalahan dan tantangan pembangunan yang terjadi di tingkat Nasional dan ada juga di tingkat daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan**

Sebagian besar pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di erasebelumnya. Namun masih ada pelaku-pelaku pelaksana pendidikan yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Di Sumatera Barat, pelaku-pelaku pendidikan sudah melakukan

perannya masing-masing, tetapi belum seoptimal yang diharapkan. Seperti belum semua anak usia 16-18 tahun tertampung atau terlayani pada satuan pendidikan menengah, belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan dan contoh lain adalah belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di satuan pendidikan.

## **2. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal**

Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Di Sumatera Barat, pelaksanaan wajib belajar belum terlayani dengan baik. Hal ini dikarenakan belum semua anak usia 16-18 tahun yang tertampung atau terlayani pada satuan pendidikan menengah.

Faktor kendala dan penyebab belum optimalnya pelayanan pendidikan pada anak usia 16-18 tahun yang tertampung dan terlayani adalah kapasitas sarana dan prasarana sekolah yang belum memungkinkan untuk menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang ada, disamping kekurangan kapasitas lokal belajar, juga adalah karena kekurangan jumlah guru yang akan mendorong dan memfasilitasi proses pembelajaran di sekolah. Pada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai, maka daya tampungnya menjadi berlebih. Sebaliknya pada sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang, justru dengan daya tampung berlebih. Artinya terjadi ketidakmerataan sarana prasarana dan ketersediaan guru yang cukup di sekolah menengah ini.

### **3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal**

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa sehingga ketika selesai melaksanakan proses wajib belajar 12 tahun, peserta didik kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Di Sumatera Barat, sebagai contoh untuk tingkatan lulusan SMK ditemukan ketidak selarasan lulusan SMK dengan dunia kerja dan industri dan beberapa contoh lainnya.

### **4. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)**

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. Selain itu jumlah yang dimiliki Sumatera Barat dan distribusi guru di Sumatera Barat belum merata, terutama di daerah 3T. Lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terbatas terhadap kualitas layanan, berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru.

### **5. Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri atau Disintegrasi Bangsa**

Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk menyiapkan generasi penerus Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, bermadani serta berdaya saing, Disdik Sumatera Barat harus menyiapkan langkah strategis yang bersinergi dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, di lingkungan bahkan

dalam berkeluarga. Selain dari enam permasalahan yang sama antara nasional dan daerah tersebut, masih ada beberapa masalah yang berda di Sumatera Barat, yakni belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan, belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di satuan pendidikan, tata kelola manajemen sekolah belum optimal dan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan terlihat keloresi antara Pembangunan Pendidikan Nasional (Renstra Kemendikbud 2015-2019) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yakni terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong, terwujudnya sumatera barat yang madani dan sejahtera dan terwujudnya sumberdaya manusia sumatera barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Gubernur Provinsi Sumatera Barat**

Penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak akan terlepas dari rencana pembangunan pendidikan pada provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021. Selain itu, juga sangat terkait erat dengan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional (2015-2019). Oleh karena itu dalam menyusun dokumen rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi oleh organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat tentu saja mempedomani kedua dokumen tersebut di atas.

Bentuk keterkaitan dalam rencana pembangunan pendidikan di Sumatera Barat sudah diawali dengan saat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat. Visi pembangunan pendidikan nasional itu menurut renstra pembangunan pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 2015-2019 (Kemendikbud RI) adalah sebagai berikut:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong”

Visi pembangunan pendidikan nasional ini kemudian dicapai dengan merumuskan misi pembangunan pendidikan nasional yang mencakup lima aspek pembangunan pendidikan nasional yakni:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
5. Mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan public.

Tujuan pembangunan pendidikan nasional itu adalah tentunya sangat terkait dengan misi yang telah di rumuskan yakni:

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan PAUD
2. Perluasan akses pendidikan dasar bermutu
3. Peningkatan kapasitas akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
4. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
5. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pendidikan karakter
6. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
7. Peningkatan jati diri bangsamelalui pemakaian bahasan sebagai pengantar

8. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public.

Visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat telah dirumuskan dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan secara nasional ini, disamping yang tidak kalah pentingnya adalah sangat berpedoman juga kepada visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang tentunya merupakan turunan dari visi, misi dan tujuan dari Gubernur Sumatera Barat terpilih pada periode 2016-2021. Visi pembangunan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam RPJMD tahun 2016-2021 itu adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Visi Gubernur Sumatera Barat yang terpilih ini telah dirumuskan ke dalam misinya sehingga mudah dilaksanakan dan menjadi arah pembangunan Sumatera Barat secara umum ke depan, tentunya tidak terlepas pula dengan pembangunan pendidikannya. Adapun misi pembangunan Sumatera Barat ke depan itu adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah; dan
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi yang sangat terkait dengan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat ini adalah misi Gubernur Sumatera Barat yang ketiga yakni meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi. Misi ini akan menjadi fokus bidang pembangunan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya di Sumatera Barat. Sedangkan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat itu dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter
2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat ini juga telah dikembangkan menjadi sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yakni:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan
5. pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja;
6. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca;
7. Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Sasaran pembangunan pendidikan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2016- 2021 ini telah menjadi landasan

bagi organisasi perangkat daerah pendidikan di Sumatera Barat untuk menyusun target-target terukur yang hendak dicapai pada periode lima tahun ke depan.

Berdasarkan kepada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan nasional dan kemudian ditambahkan pula oleh visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat, maka kemudian disusun pula visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam rencana strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tahun 2016- 2019. Adapun visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam Renstra OPD Pendidikan Nasional Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing”

Visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat ini telah memperhatikan tahapan pembangunan pendidikan nasional dalam rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang, dimana pada RPJMN tahun 2015-2020 telah dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan daya saing regional dalam rangka menuju dan mempersiapkan peningkatan daya saing bangsa. Sehingga dalam visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat mencantumkan kalimat terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing.

Visi ini kemudian dikongkritkan dengan merumuskan misi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang berlandaskan kepada misi pembangunan pendidikan nasional dan provinsi Sumatera Barat yakni:

1. Mewujudkan akses dan pemerataan layanan pendidikan
2. Mewujudkan kompetensi, dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
3. Mewujudkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi



4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi tata kelola layanan pendidikan
5. Mewujudkan pendidikan berkarakter madani

Tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya sangat terkait dengan misi pembangunan pendidikan yang telah dikemukakan di atas, ini telah mencakup pilar pembangunan pendidikan nasional dan provinsi yakni pemerataan akses dan layanan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan peningkatan profesionalisme guru. Adapun tujuan pembangunan pendidikan secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Sumatera Barat
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan
5. Pengimplementasian pendidikan berkarakter madani

Adapun sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat itu tentunya sangat terkait pula dengan tujuannya yakni:

1. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan Sumatera Barat
2. Meningkatnya kompetensi dan professionalism guru dan tenaga kependidikan
3. Meningkatnya mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan
5. Terimplementasikannya pendidikan berkarakter madani

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Sumatera Barat ini, maka terlihat jelas bahwa saling

keterkaitan diantaranya baik keterkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di tingkat nasional dan provinsi, tetapi juga saling keterkaitan antara visi, misi dan tujuan serta sasaran itu sendiri sebagai satu kesatuan dalam menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan ke depannya. Visi yang dirumuskan sangat futuristik namun dengan perumusan misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistik, sehingga mudah diukur sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Untuk merumuskan visi dan misi yang sesuai dan tepat, maka dibutuhkan kesesuaian-kesesuaian antara unsur-unsur penting di dalam sebuah kesatuan atau institusi terkait. Penyesuaian ini berguna untuk menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang bermanfaat dan berdampak dalam masa tertentu baik dengan institusi yang membuat atau institusi yang ada di bawahnya. Untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Disdik Sumatera Barat, maka perlu di sesuaikan kebijakan yang akan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada Renstra Kemendikbud. Pada masa perodesasi 2015-2019 ini, dalam Renstra Kemendikbud menyebutkan bahwa “pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan isi Renstra tersebut, maka jelaslah bahwa Disdik Sumatera Barat, sebagai pemerintah wajib memajukan pendidikan, pelayanan serta pengembangan-pengembangan keilmuan pada seluruh unsur terkait yang ada di dalam Disdik Sumatera Barat.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Penyusunan renstra pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya memperhatikan rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 2015-2019 dimana pembangunan pendidikan nasional itu didasarkan atas beberapa paradigma yaitu: Paradigma pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Selanjutnya, terdapat empat tema pembangunan pendidikan secara pendidikan nasional itu yaitu: peningkatan kapasitas dan modernisasi, penguatan pelayanan pendidikan, menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional, dan peningkatan daya saing internasional. Pada saat sekarang ini tahap pembangunan pendidikan nasional itu berada pada tahap ketiga yakni menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Tema pembangunan pendidikan 2015-2019 adalah peningkatan daya saing regional ini tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola manajemen sekolah, agar kualitas proses belajar mengajar menjadi bermutu, hanya lembaga pendidikan dan proses pendidikan yang bermutulah yang mampu mengungguli persaingan di wilayah regional ini. Oleh karena itu diperlukan penetapan kriteria dan indikator mutu pendidikan yang mampu bersaing secara regional paling tidak di wilayah ASEAN.

Penentuan konsep daya saing dalam pendidikan tentu merupakan kunci awal untuk merumuskan kriteria dan indikator daya saing pendidikan daerah secara regional itu. Menurut World Bank (2003) ada 3 factor penentu daya saing yakni: 1). factor driven yang mencakup kelembagaan pendidikan, terutama system manajemen sekolah yang dikembangkan, infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi pendidikan yang mencakup kecukupan jumlah guru, kecukupan pendidikan dan pelatihan guru, kecukupan kompetensi guru dan keberadaan siswa. 2).

Efficiency driven, mencakup ketersediaan system informasi dan teknologi pembelajaran, system pendidikan dan pelatihan guru yang regular dan kontinyu. 3). Innovation driven yang mencakup penciptaan lingkungan sekolah sekolah yang menyenangkan sesuai dengan usia pembelajar, dan inovasi layanan pendidikan untuk membentuk karakter madani yang unggul dan berdaya saing regional.

Capaian pembangunan pendidikan menengah dikenakan pada upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014.

Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, capaian ditunjukkan oleh 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2013. Pemerintah juga telah berusaha secara terus-menerus untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya juga berkaitan dengan pola dan struktur penggunaan ruang untuk kepentingan pembangunan. Rencana sistem perkotaan provinsi Sumatera Barat, telah menempatkan kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), yang harus didukung oleh wilayah sekitarnya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) seperti Kota Bukittinggi, Kota Solok, Aro Suka, Kota Pariaman, Kota Painan. Dimana PKW ini harus pula didukung oleh Pusat kegiatan lokal (PKL)nya. Kota padang sebagai PKN merupakan

pusat pengembangan ekonomi yang berbasis kepada industri pengolahan dan jasa, termasuk jasa pendidikan karena kota Padang juga dikenal dengan kota pendidikan.

Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi: Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dapat dikembangkan sebagai Kota Metropolitan dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- a. Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti,
- b. Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit,
- c. Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil

Sebagai pusat kegiatan nasional, dengan pusat aktifitas utama adalah industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan, haruslah mampu mendukung kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan bagi pusat-pusat kegiatan di bawahnya. Pusat kegiatan pengembangan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi tentunya harus dimainkan oleh kota Padang, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan pendidikan seperti pusat pelayan penelitian, pusat pelayanan sistem inovasi daerah (SIDA), pusat pengembangan entrepreneur.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional. Selain itu pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman provinsi ini dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Pengembangan sistem transportasi dilakukan secara terintegrasi yang meliputi rencana

pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Jaringan transportasi tentunya dibutuhkan antar pusat layanan pendidikan dan penelitian yang ada.

Pengembangan jaringan prasarana energi di Provinsi Sumatera Barat terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan. Penyediaan energi listrik di wilayah Sumatera Barat untuk jangka pendek, jika dilihat dari pembangkit yang ada sudah melebihi kapasitas dan digunakan untuk kebutuhan energi listrik di provinsi lain yang tergabung dalam sistem jaringan interkoneksi. Sampai tahun 2032 diperkirakan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Barat mencapai 7.300 GWH. Kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya sebesar 6,3%. Arah pengembangan pasokan jaringan listrik untuk kebutuhan pelayanan pendidikan dan penelitian dan sistem inovasi diperlukan keterjaminannya, agar kegiatan pelayanan pendidikan tidak terganggu.

Jaringan sistem telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk pada pelayanan pendidikan, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa sentral telepon otomatis (STO) yang tersebar pada seluruh kota dan kabupaten di provinsi ini. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit. Prasarana telekomunikasi dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi kebutuhan pada pelayanan pendidikan juga.

Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait. Ketersediaan air baku untuk kepentingan pelayanan pendidikan dan penelitian pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Prasarana lingkungan terdiri atas:

- 1) Tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu (regional).
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- 3) Sistem drainase.
- 4) Sistem pengelolaan air minum (SPAM).
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat, termasuk sarana dan prasarana pendidikan

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Rencana pola ruang untuk pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya ini berkaitan dengan penciptaan suasana sekolah yang menyenangkan dengan konsep sekolah hijau.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya. Kawasan strategis ini terdiri atas:

- a. Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Sumatera Barat terdapat 4 Kawasan Strategis Nasional yang meliputi:
  - 1) Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup
  - 2) Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup
  - 3) Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

4) Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan

b. Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi. Perwujudan Kawasan Strategis provinsi dilihat dari :

1) Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat 10 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat

2) Sosial Budaya yang terdapat 1 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar

Pengembangan kawasan strategis ini, berkaitan dengan kepentingan upaya pelestarian lingkungan hidup yang dianggap penting mempengaruhi wilayah lainnya dan menjaga kawasan kota utama mampu menjalankan perannya dengan baik. Dalam kaitannya dalam pembangunan pendidikan kawasan strategis tentunya harus pula didukung oleh pelayanan pendidikan baik untuk penelitian dan konservasi maupun untuk kegiatan pembelajaran untuk pelestarian lingkungan.

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra pendidikan Sumatera Barat. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

1. Trend pertumbuhan ekonomiyang cenderung terus menguat dan didukung oleh beberapa indikator makro perekonomian seperti peningkatan kelas menengah, peningkatan jumlah untuk kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menjaga keseimbangan ekonomi
2. Peningkatan daya saing
3. Perkembangan demografi
4. Spektrum tenaga kerja terampil
5. Kondisi sosial masyarakat (role model)



## 6. Kondisi jati diri bangsa

Aspek lingkungan strategis diatas sangat mempengaruhi pada kebijakan pembangunan layanan pendidikan di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkatkan diperlukan untuk serapan tenaga kerja terampil dan penciptaan peluang usahawan ekonomi sebagai hasil pendidikan kewirausahaan. Peningkatan daya saing berarti upaya badan layanan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas calon tenaga kerja yang dididik di lembaga pendidikan menengah dan tinggi. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkatkan dan bonus demografi yang dialami Indonesia, karena semakin besarnya penduduk usia muda atau usia sekolah dan semakin tingginya umur harapan hidup ini membawa konsekwensi yang penting untuk pembangunan sumberdaya manusia yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengambil peran penting dalam percaturan perdagangan di dunia global.

### **3.5 Penentuan Isu Isu strategis**

Penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh berbeda dengan isu yang berkembang dan beredar di kalangan nasional, diantaranya adalah penciptaan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan penciptaan pembelajar yang berdaya saing. Pengembangan lingkungan pendidikan yang menghargai multikultural, pembentukan karakter madani melalui pendidikan. Semuanya diuraikan satu persatu berikut ini.

#### **1. Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Menciptakan Pembelajar yang berdayasaing**

Untuk menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan dan pembelajaran yang berdaya saing di lingkungan sekolah, diperlukan langkah-langkah kongkrit agar suasana tersebut bisa tercapai. Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara

manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya akan menciptakan suasana yang baik, baik untuk siswa ataupun pengelola yang ada di dalamnya. Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga setelah siswa menyelesaikan masa studi dan melanjutkan ke dua kerja, mereka akan bersaing dengan baik serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang berasal dari sekolah menengah kejuruan.

Membicarakan lapangan kerja, sebagai industri untuk menghasilkan dan membina tenaga kerja profesional dan handal, maka dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara sekolah dan dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

## **2. Pengembangan Lingkungan Pendidikan yang Menghargai Multi Kultural dan Kebinekaan**

Pemerintah daerah dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan

dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan. Sesuai dengan visi Kemdikbud 2015-2019 yang berbunyi terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong, maka luaran dari misi ini juga mengharapkan lingkungan pendidikan yang saling menghargai multi kultural dan kebinaan yang bergotong royong. Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; dan
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kemandirian dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas agar terciptanya suasana yang kondusif. Penguatan peran orang tua, masyarakat, industri dan organisasi sosial dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, mereka diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

### **3. Pembentukan Karakter Madani Melalui Layanan Pendidikan**

Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera, merupakan visi dari RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Dari visi itu Disdik Sumatera Barat berangkat dan memaknai bahwa karakter madani dapat diwujudkan melalui pendidikan. Madani berarti segala sesuatu yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban. Ilmu atau pendidikan yang madani akan membentuk karakter anak didik yang cerdas, baik cerdas spiritual (rohani dan bathin), cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual (cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan), dan cerdas kinestetik.

Hal tersebut tidak akan terwujud dari peran sekolah, guru dan pelayan pendidikan saja, tetapi juga semua aspek pendukung yang ada di sekitar peserta didik tersebut seperti orang tua, masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, organisasi sosial, pemerintah serta semua aspek pendukung untuk membentuk katakter madani melalui layanan pendidikan ini. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan komponen penting untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani.

### **3.6 Isu Isu strategis Pendidikan Sumatera Barat**

Pengalihan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Sumatera Barat menggunakan kerangka berpikir faktor penentu daya saing pendidikan provinsi Sumatera Barat yakni: pertama faktor driven yang meliputi kelembagaan pendidikan, sistem manajemen sekolah, infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi sekolah yang terlihat dari kecukupan guru, kecukupan kompetensi guru dan kecukupan pelatihan guru. Faktor penentu daya saing kedua adalah efisiensi driven meliputi kondisi sistem informasi dan teknologi pembelajaran dan sistem pendidikan dan pelatihan guru. Sedangkan faktor penentu daya saing ketiga adalah innovation driven meliputi lingkungan sekolah yang menyenangkan dan inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter madani.

Pembangunan pendidikan Sumatera Barat selama ini tentu saja memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan yang merupakan factor internal dalam system pendidikan Sumatera Barat. Untuk mengidentifikasi sejumlah kelemahan dan tantangan yang merupakan factor dari dalam (internal), maka digunakan kerangka analisis SWOT (Lihat Rangkuti, F (2000). Dalam menyusun matrik table SWOT untuk menemukan strategi pembangunan pendidikan sumatera Barat yang pada tahap ini berada di upaya peningkatan daya saing wilayah secara regional, maka dikemukakan dulu sejumlah factor strategis internal (IFAS) dan factor strategis eksternal (EFAS) dengan cara memberikan

bobot masing-masing factor sebagai factor yang sangat penting dan kurang penting, lalu menghitung ratingnya dengan memberikan derajat kepentingannya dengan skala 1-4, sehingga di peroleh skor pembobotan., dengan demikian dapat dikemukakan factor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat dan disusun matrik SWOTnya untuk menentukan strategi peningkatan (SO, WO) dan strategi perbaikan (ST dan WT).

Kekuatan dan kelemahan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai factor internal dalam pembangunan pendidikan selama ini. Factor strategis diperoleh dari komponen yang membentuk daya saing pendidikan Sumatera Barat yang terdiri dari *factor driven*, *efisiensi driven* dan *innovation driven*, Sedangkan pembobotan dilakukan dengan memberikan derajat kepentingan factor ini dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat secara regional dengan skala sangat penting (1,0) sampai skala tidak penting (0,0), pembobotan ini murni didasarkan kepada keputusan kepakaran saja (*expert judgement*), sehingga akan berbeda diantara pakar yang menganalisisnya. Demikian pula untuk penentuan rating; merupakan skala pengaruh factor strategis ini terhadap kondisi daya saing pendidikan saat ini dengan memberikan skala 4 (sangat berpengaruh) sampai 1 (kurang berpengaruh). Skor total dari bobot dikalikan dengan rating memperlihatkan tingkat kekuatan dan kelemahan daya saing pendidikan Sumatera Barat saat ini. Semakin besar skor totalnya semakin besar pengaruh factor internal dan eksternal daya saing pendidikan ini.

Kekuatan daya saing pendidikan Sumatera Barat pertama terletak pada keberadaan lembaga pendidikan menengah yang terdiri dari SMA dan SMK yang sudah memadai apabila dilihat dari jumlah dan sebarannya di setiap kabupaten dan kota. Bahkan pada setiap kecamatan sudah terdapat SMA dan SMK di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Menurut standar Unesco, satu sekolah akan melayani 500-1000 penduduk tentunya ini dapat dicapai. Factor yang menjadi

kekuatan kedua untuk peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat adalah system manajemen sekolah yang didasarkan kepada kelayakan dan kepatutan dan berbasis merit system. Manajemen sekolah diarahkan kepada peningkatan system penjaminan mutu yang bermuara kepada pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah menengah. Factor infrastruktur sekolah sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing, melalui penggunaan dana bantuan operasional sekolah, sekolah memiliki sumber pendanaan untuk melengkapi infrastruktur sekolah, disamping sumbangan dari masyarakat dalam bentuk kepedulian komite sekolah untuk melengkapi semua infrastruktur sekolah akan terpenuhi syarat yang diharuskan oleh system penjaminan mutu sekolah. Factor internal terakhir yang memberikan potensi untuk mendorong kearah peningkatan daya saing regional pendidikan Sumatera Barat adalah kesehatan organisasi sekolah yang terlihat dari kecukupan jumlah guru dan pendidikan guru. Jumlah guru pada semua tingkatan sekolah sudah memadai, walaupun distribusinya belum merata. Namun jumlah guru yang memadai dan ditambah dengan banyaknya lembaga perguruan tinggi yang mencetak calon guru dan berkerja sama dengan sekolah di wilayah ini, merupakan suatu kekuatan yang akan mendorong kepada penciptaan kesehatan organisasi sekolah di Sumatera Barat.

Tabel 3.1. Faktor Strategis Internal Peningkatan Daya Saing Pendidikan Sumatera Barat

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Kekuatan:				
1 Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang memadai	0,10	2	0.20	Lembaga pendidikan menengah dengan system manajemen dan infrastruktur
2 Sistem manajemen sekolah	0.10	3	0.30	infrastruktur sekolah yang sehat
	0.15	3	0.45	

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
3 Infrastruktur sekolah 4 Kesehatan organisasi sekolah	0.15	4	0,60	akan mendorong kepada daya saing regional pendidikan
Kelemahan :				Sistem informasi
1 Kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai	0.10	4	0.40	teknologi pembelajaran yang lamban, karena rendahnya
2 Kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah (hasil UKG rendah)	0.15	4	0.60	kompetensi guru untuk mengadopsi teknologi informasi dan
3 Lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme	0.15	3	0.45	kecenderungan lingkungan sekolah yang mudah disusupi oleh nilai radikal karena belum terbentuknya karakter pendidikan
4 Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah	0.10	3	0.30	
Total	1.00		3,30	



Berdasarkan kepada tabel 3.1. di atas, terlihat bahwa faktor internal berupa kekuatan dari infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi sekolah memiliki bobot yang lebih tinggi untuk menentukan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Sedangkan kelemahan daya saing pendidikan Sumatera Barat terletak paling tinggi bobotnya pada kondisi sistem informasi dan teknologi pembelajaran yang masih jauh tertinggal dengan sistem informasi yang berkembang diluar, dan masih rendahnya kompetensi guru dalam penguasaan ICT pembelajaran ini telah memungkinkan mudahnya kecenderungan masuk paham radikal ke dalam lingkungan sekolah, sehingga inilah yang mengancam kepada pembentukan karakter siswa yang relegius, cerdas dan bertanggungjawab. Lembaga pendidikan menengah dengan system manajemen dan infrastruktur sekolah yang sehat akan mendorong kepada daya saing regional pendidikan.

Skor total untuk faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan daya saing pembangunan pendidikan Sumatera Barat adalah mencapai 3,30 yang disumbang paling tinggi oleh bobot kesehatan organisasi sekolah yang ditunjukkan oleh kecukupan jumlah guru dan distribusinya dan kecukupan kompetensi dan hasil uji kompetensi guru yang masih rendah. Sistem informasi teknologi pembelajaran yang lamban, karena rendahnya kompetensi guru untuk mengadopsi teknologi informasi dan lingkungan sekolah yang cenderung dengan mudah disusupi oleh nilai radikal karena belum terbentuknya karakter pendidikan belum sejalan dengan kemajuan system informasi dari luar.

Tabel 3.2. Faktor strategis eksternal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat

Factor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
<b>Peluang :</b>				
1. Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang mendorong kepada sekolah bermutu	0,10	4	0.40	Sistem kelayakan sekolah dan penilaian prestasi sekolah telah mendorong perlunya
2. Penilaian sekolah berprestasi nasional	0.10	3	0.30	
3. Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN	0.15	3	0.45	kerjasama dengan sekolah mitra di LN
4. Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional	0.15	4	0,60	
<b>Ancaman :</b>				
1. Mudah nya masuk informasi teknologi ke lingkungan sekolah secara bebas	0.10	4	0.40	Masuk nya system informasi dan teknologi pembelajaran secara bebas menuntut kepada perbaikan mutu kompetensi guru di
2. Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga	0.15	3	0.45	
3. Standarisasi sekolah nasional dan internasional	0.10	2	0.20	

Factor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
4. Kecenderungan akan terjadinya Disintegrasi bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-sumber belajar di sekolah				bidang penguasaan ICT dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan local untuk membentengi nilai-nilai yang mengancam keutuhan NKRI
Total	1.00		3,25	

Tabel 3.2. di atas memperlihatkan bahwa faktor strategis eksternal berupa peluang peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat dengan bobot paling tinggi itu adalah terdapatnya sistem akreditasi sekolah untuk mendorong dan menjamin kepada pencapaian sekolah bermutu dan terdapatnya lembaga sertifikasi guru yang dikembangkan secara nasional dan daerah akan mendorong kepada penciptaan sekolah yang bermutu di Sumatera Barat. Sedangkan pada bobot yang paling tinggi pada sisi ancaman yang akan dihadapi dalam meningkatkan daya saing pendidikan Sumatera Barat adalah mudahnya masuk sistem informasi dan komunikasi dan teknologi yang menunjang sistem pembelajaran.

Berdasarkan kepada nilai akhir dari faktor internal dan eksternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat, maka terlihat

bahwa nilai faktor internal lebih tinggi dari faktor eksternal itu sendiri, sehingga hal ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan daya saing pendidikan di Sumatera Barat.

Adapun strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat (S-O) yang dapat dilakukan dalam selama periode renstra ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan daya saing sekolah melalui perbaikan infrastruktur sekolah dan penyehatan organisasi sekolah untuk mampu berprestasi unggul dilevel regional
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk penguasaan ICT dengan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan dan mitra di luar negeri.

Strategi penguatan ini diharapkan mampu memayungi program-program peningkatan mutu pendidikan melalui kelayakan sekolah dan sertifikasi guru oleh lembaga sertifikasi pendidikan, mulai dari program peningkatan infrastruktur sekolah, peningkatan sistem tatakelola dan program peningkatan kesehatan organisasi sekolah yang semuanya harus bermuara kepada penciptaan sekolah yang layak, unggul, berprestasi nasional dan mampu menjalan kerja sama dengan sekolah mitra di luar negeri, atau paling tidak pada level ASEAN.

Sedangkan strategi perbaikan untuk peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat (W-T) yang dapat dilakukan dalam periode renstra ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem tata kelola sekolah melalui perbaikan sistem informasi teknologi yang menunjang proses pembelajaran untuk menyaring informasi dan teknologi yang masuk secara bebas dalam lingkungan sekolah
2. Peningkatan pendidikan karakter melalui penyehatan lingkungan internal sekolah yang menyenangkan dengan menanamkan nilai –nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran oleh guru dan warga sekolah.

Diharapkan keempat strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional diatas dapat menghasilkan dan memayungi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan dengan sasaran utamanya adalah terciptanya daya saing kualitas pendidikan Sumatera Barat di level regional yang ditandai dengan terdapatnya sekolah yang berakreditasi internasional, terdapatnya sekolah yang menjalin kerjasama dengan sekolah mitra regional untuk peningkatan mutu pembelajaran, mutu guru dan mutu sistem tatakelola untuk meningkatkan kelayakan sekolah menengah di Sumatera Barat.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN

Pada bab ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat. Tujuan yang dirumuskan tentunya telah diturunkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Setiap tujuan yang dirumuskan pula sasaran yang hendak dicapai dan indikator tujuan dan sasaran, serta target kinerja sesuai dengan tujuan berdasarkan tahun perencanaan.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat maka Visi yang ditetapkan adalah Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang terkait dengan Urusan Pendidikan adalah Misi ke-1 (satu) yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Trampil dan Berdaya Saing”***. Sedangkan Tujuan sesuai dengan Misi ke 1 yang terkait dengan Pendidikan tersebut adalah ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia, sehat, unggul dan Berdaya Saing”***. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus;
- 2) Peningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa;
- 3) Peningkatkan daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; dan

- 4) Peningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mempedomani Tujuan dan Sasaran RPJMD maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah “**Meningkatnya kualitas Pendidikan**” Sedangkan Indikator dan Target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Target Tahunan Capaian Tujuan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas Pendidikan	1. Harapan lama sekolah	14,19	14,27	14,36	14,44	14,52
	2. Rata-rata lama sekolah	9,22	9,33	9,45	9,56	9,67

Untuk mencapai Tujuan Jangka Menengah tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus
2. Peningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa
3. Peningkatkan daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
4. Peningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya untuk Indikator dan Target sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Target Tahunan Capaian Sasaran Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Misi 1	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
Tujuan	: Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing
Indikator	: Harapan lama sekolah dan Rata - rata lama sekolah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	52,87	53,80	54,72	55,65	56,57



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	91,70	93,22	94,70	96,20	97,70
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77
		Persentase SMA Negeri terakreditasi	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50
		Persentase SMK Negeri terakreditasi	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75
		Persentase SLB Negeri terakreditasi	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00
2.	Peningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	N/A	58,2	58,51	58,82
		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	N/A	27,4	27,70	28,01

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
3.	Peningkatkan daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Jumlah SMK yang terevitalisasi	N/A	58,2	58,51	58,82	59,13
		Persentase Guru Kejuruan yang tersedia di SMK	N/A	27,4	27,70	28,01	28,32
		Persentase Guru Kejuruan yang tersedia di SMK	N/A	3	6	9	12
4.	Peningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Rasio guru terhadap murid pada SMA	14,04	14,54	15,05	15,55	16,06
		- Rasio guru terhadap murid pada SMK	12,57	12,95	13,32	13,69	14,07
		- Rasio guru terhadap murid pada SLB	5,27	5,49	5,72	5,95	6,17
		- Kualifikasi guru SMA pendidikan minimal S1/D4	9.584	9.607	9.630	9.643	9.652
		- Kualifikasi guru SMK pendidikan minimal S1/D4	5.902	5.917	5.931	5.946	5.960
		- Kualifikasi guru SLB pendidikan minimal S1/D4	421	428	435	442	449

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
		- Guru SMA yang bersertifikasi	6.073	6.459	6.845	7.231	7.617
		- Guru SMK yang bersertifikasi	3.808	4.047	4.285	4.524	4.762
		- Guru SLB yang bersertifikasi	239	257	275	293	311
		- Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMA pendidikan minimal S1/D4	1.026	1.088	1.149	1.211	1.273
		- Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMK pendidikan minimal S1/D4	508	542	577	611	645
		- Kualifikasi Tenaga Kependidikan SLB pendidikan minimal S1/D4	44	46	47	49	50

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang diturunkan dari analisis SWOT dengan menelusuri faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan selama ini, sehingga ditemukan strategi yang tepat menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun ke depan.

Penyusunan rencana pembangunan pendidikan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat. , Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekuatan atau keunggulan yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya lembaga layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi A dan B 73,4%
- b. Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi  $\geq$  S1 96,68%
- c. Lulusan SMA/SMK 99,85%
- d. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih tinggi
- e. Budaya ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) sebagai jati diri masyarakat Sumatera Barat.

Dibalik kekuatan dan peluang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai gangguan yang bisa menghambat terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah distribusi guru yang belum merata secara spatial (3T) dan pusat pertumbuhan;
- b. Lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja masih rendah;
- c. Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana pendidikan;

- d. Belum seimbangnya jumlah guru dengan kebutuhan; dan
- e. Belum optimalnya penerapan IPTEK.

Disamping adanya gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa tantangan atau ancaman dari luar yang menyulitkan , Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yakni:

- a. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
- b. Pesatnya peningkatan kualitas pendidikan provinsi tetangga;
- c. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
- d. Isorientasi penggunaan teknologi informasi.

Untuk mengatasi tantangan atau ancaman tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai peluang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, sehingga upaya-upaya yang telah dirumuskan dan direncanakan akan tercapai. Peluang-peluang tersebut adalah:

- a. Inpres No: 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK;
- b. Pengadaan guru garis depan bagi daerah 3T;
- c. Peluang kerjasama dengan asosiasi dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan; dan
- d. Adanya Lembaga sertifikasi keahlian lulusan SMK. Terbukanya peluang bagi tamatan SMK untuk mendapatkan sertifikasi keahlian.

Langkah pertama adalah merumuskan faktor strategis internal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat. faktor strategi internal yang mendorong kepada peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dapat dilihat dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan. Adapun faktor internal dari kekuatan peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat itu adalah 1) Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang memadai, 2) Sistem manajemen sekolah yang sudah berjalan, 3) Infrastruktur sekolah yang

sudah ada, 4) Kesehatan organisasi sekolah. Sedangkan faktor internal yang merupakan kelemahan dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional adalah: 1) Kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai, 2) Kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah, 3) Lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme, 4) Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah.

Pada sisi lain faktor strategis eksternal yang mempengaruhi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat ke depan itu dari faktor peluang adalah: 1) Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang mendorong kepada sekolah bermutu, 2) Penilaian sekolah berprestasi nasional, 3) Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN, 4) Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional. Sedangkan factor strategi eksternal berupa ancaman terhadap pencapaian daya saing pendidikan Sumatera Barat kedepan itu adalah: 1) Mudahnnya masuk informasi teknologi kelingkungan sekolah secara bebas, 2) Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga, 3) Standarisasi sekolah nasional dan internasional, 4) Kecenderungan akan terjadinya integrasi bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-sumber belajar di sekolah.

Berdasarkan kepada faktor strategis internal dan eksternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat diatas, kemudian dapat dirumuskan strategis peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Strategi ini tentunya akan memayungi program dan kegiatan dalam peningkatan daya saing di level regional dalam lima tahun ke depan. Berikut ini akan disajikan penyelarasan strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di lvel regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2022-2026.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Visi	: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan
Misi	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus	Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan	-Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat -Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK</li> <li>-Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK</li> <li>- Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK</li> <li>- Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus</li> <li>-Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK</li> <li>-Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB)</li> </ul>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	- Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
	Peningkatkan daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal	Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra	Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah
	Peningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan	-Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota -Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota

**BAB VI**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan**  
**Provinsi Sumatera Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		2022		2023		2024		2025						2026	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>																				
Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA	50,88	256.544.000.561	52,38	53,88	55,38	56,88	296.981.748.649	58,38	311.830.836.082	58,38	327.422.377.886			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	
				APK SMK	31,27		32,27	34,27	35,77	37,27		38,77								
				APM SLB	52,87	53,8	54,72	55,65	56,57	57,5										
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C	124.058.378.811	130.261.297.752	136.774.362.639	143.613.080.771	150.793.734.810	158.333.421.550										
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Penambahan Ruang Kelas Baru	19 Sekolah 7.556.471.231	20 Sekolah 7.934.294.793	21 Sekolah 8.331.009.532	22 Sekolah 8.747.560.009	23 Sekolah 9.184.938.009	24 Sekolah 9.644.184.910										
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5 Sekolah 1.162.970.000	6 Sekolah 1.221.118.500	7 Sekolah 1.282.174.425	8 Sekolah 1.346.283.146	9 Sekolah 1.413.597.304	10 Sekolah 1.484.277.169										
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Terbangunnya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	7 Sekolah 1.508.615.070	8 Sekolah 1.584.045.824	9 Sekolah 1.663.248.115	10 Sekolah 1.746.410.520	11 Sekolah 1.833.731.046	12 Sekolah 1.925.417.599										
		1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Terbangunnya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	10 Sekolah 2.720.438.780	11 Sekolah 2.856.460.719	12 Sekolah 2.999.283.755	13 Sekolah 3.149.247.943	14 Sekolah 3.306.710.340	15 Sekolah 3.472.045.857										
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Sekolah 781.244.000	4 Sekolah 820.306.200	5 Sekolah 861.321.510	6 Sekolah 904.387.586	7 Sekolah 949.606.965	8 Sekolah 997.087.313										
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Sekolah 249.175.000	2 Sekolah 261.633.750	3 Sekolah 274.715.438	4 Sekolah 288.451.209	5 Sekolah 302.873.770	6 Sekolah 318.017.458										
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	6 Sekolah 4.467.883.180	7 Sekolah 4.691.277.339	8 Sekolah 4.925.841.206	9 Sekolah 5.172.133.266	10 Sekolah 5.430.739.930	11 Sekolah 5.702.276.926										
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	179 Sekolah 45.524.904.050	180 Sekolah 47.801.149.253	181 Sekolah 50.191.206.715	182 Sekolah 52.700.767.051	183 Sekolah 55.335.805.403	184 Sekolah 58.102.595.674										
		1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Pembangunan Fasilitas Parkir	4 Sekolah 728.680.000	5 Sekolah 765.114.000	6 Sekolah 803.369.700	7 Sekolah 843.538.185	8 Sekolah 885.715.094	9 Sekolah 930.000.849										
		1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Kantin Sekolah	3 Sekolah 551.980.000	4 Sekolah 579.579.000	5 Sekolah 608.557.950	6 Sekolah 638.985.848	7 Sekolah 670.935.140	8 Sekolah 704.481.897										
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14 Sekolah 3.186.023.000	15 Sekolah 3.345.324.150	16 Sekolah 3.512.590.358	17 Sekolah 3.688.219.875	18 Sekolah 3.872.630.869	19 Sekolah 4.066.262.413										
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	2 Sekolah 333.808.000	3 Sekolah 350.498.400	4 Sekolah 368.023.320	5 Sekolah 386.424.486	6 Sekolah 405.745.710	7 Sekolah 426.032.996										
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1 Sekolah 1.037.000.000	2 Sekolah 1.088.850.000	3 Sekolah 1.143.292.500	4 Sekolah 1.200.457.125	5 Sekolah 1.260.479.981	6 Sekolah 1.323.503.980										
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11 Sekolah 2.315.425.500	12 Sekolah 2.431.196.775	13 Sekolah 2.552.756.614	14 Sekolah 2.680.394.444	15 Sekolah 2.814.414.167	16 Sekolah 2.955.134.875										
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1 Sekolah 209.775.000	2 Sekolah 220.263.750	3 Sekolah 231.276.938	4 Sekolah 242.840.784	5 Sekolah 254.982.824	6 Sekolah 267.731.965										
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah	20 Sekolah 4.958.000.000	21 Sekolah 5.205.900.000	22 Sekolah 5.466.195.000	23 Sekolah 5.739.504.750	24 Sekolah 6.026.479.988	25 Sekolah 6.327.803.987										
		1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25 Sekolah 41.433.862.000	26 Sekolah 43.505.555.100	27 Sekolah 45.680.832.855	28 Sekolah 47.964.874.498	29 Sekolah 50.363.118.223	30 Sekolah 52.881.274.134										
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	17 Sekolah 4.967.216.400	18 Sekolah 5.215.577.220	19 Sekolah 5.476.356.081	20 Sekolah 5.750.173.885	21 Sekolah 6.037.682.579	22 Sekolah 6.339.566.708										

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat	1 Kegiatan	364.907.600	1 Kegiatan	383.152.980	1 Kegiatan	402.310.629	1 Kegiatan	422.426.160	1 Kegiatan	443.547.468	1 Kegiatan	465.724.842				
		<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C</b>		<b>123.925.625.050</b>		<b>130.121.906.303</b>		<b>136.628.001.618</b>		<b>143.459.401.699</b>		<b>150.632.371.783</b>		<b>158.163.990.373</b>				
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Baru SMK yang dibangun	3 Kegiatan	2.388.001.000	3 Kegiatan	2.507.401.050	3 Kegiatan	2.632.771.103	3 Kegiatan	2.764.409.658	3 Kegiatan	2.902.630.141	3 Kegiatan	3.047.761.648				
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Fasilitas Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6 Kegiatan	1.057.272.200	6 Kegiatan	1.110.135.810	6 Kegiatan	1.165.642.601	6 Kegiatan	1.223.924.731	6 Kegiatan	1.285.120.967	6 Kegiatan	1.349.377.015				
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terbangunnya Fasilitas Ruang Praktik Siswa	5 Kegiatan	1.353.364.850	5 Kegiatan	1.421.033.093	5 Kegiatan	1.492.084.747	5 Kegiatan	1.566.688.984	5 Kegiatan	1.645.023.434	5 Kegiatan	1.727.274.605				
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Terbangunnya Fasilitas Ruang Laboratorium Komputer	2 sekolah	1.016.820.000	3 sekolah	1.067.661.000	4 sekolah	1.121.044.050	5 sekolah	1.177.096.253	6 sekolah	1.235.951.065	7 sekolah	1.297.748.618				
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Fasilitas Ruang Perpustakaan Sekolah	2 sekolah	688.947.000	3 sekolah	723.394.350	4 sekolah	759.564.068	5 sekolah	797.542.271	6 sekolah	837.419.384	7 sekolah	879.290.354				
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Fasilitas Ruang serba Guna/Aula	6 Sekolah	2.042.643.800	7 Sekolah	2.144.775.990	8 Sekolah	2.252.014.790	9 Sekolah	2.364.615.529	10 Sekolah	2.482.846.305	11 Sekolah	2.606.988.621				
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	68 Sekolah	16.926.636.350	69 Sekolah	17.772.968.168	70 Sekolah	18.661.616.576	71 Sekolah	19.594.697.405	72 Sekolah	20.574.432.275	73 Sekolah	21.603.153.889				
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Fasilitas Parkir	4 Sekolah	326.528.600	5 Sekolah	342.855.030	6 Sekolah	359.997.782	7 Sekolah	377.997.671	8 Sekolah	396.897.554	9 Sekolah	416.742.432				
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Fasilitas Kantin Sekolah	5 Sekolah	198.672.600	6 Sekolah	208.606.230	7 Sekolah	219.036.542	8 Sekolah	229.988.369	9 Sekolah	241.487.787	10 Sekolah	253.562.176				
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi terhadap bangunan sekolah	2 sekolah	395.364.000	3 sekolah	415.132.200	4 sekolah	435.888.810	5 sekolah	457.683.251	6 sekolah	480.567.413	7 sekolah	504.595.784				
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula	Terlaksananya rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula sebagai Kenyamanan Siswa dalam Proses Belajar	9 sekolah	446.090.000	10 sekolah	468.394.500	11 sekolah	491.814.225	12 sekolah	516.404.936	13 sekolah	542.225.183	14 sekolah	569.336.442				
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai kenyamanan siswa dalam Proses belajar		1.650.833.500		1.733.375.175		1.820.043.934		1.911.046.130		2.006.598.437		2.106.928.359				
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpenuhinya dan tersedianya Mebeler Kelas untuk siswa dan guru	17 sekolah	996.763.900	18 sekolah	1.046.602.095	19 sekolah	1.098.932.200	20 sekolah	1.153.878.810	21 sekolah	1.211.572.750	22 sekolah	1.272.151.388				
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	1 Sekolah	100.000.000	2 Sekolah	105.000.000	3 Sekolah	110.250.000	4 Sekolah	115.762.500	5 Sekolah	121.550.625	6 Sekolah	127.628.156				
		1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan SMK	12 Sekolah	87.988.653.800	13 Sekolah	92.388.086.490	14 Sekolah	97.007.490.815	15 Sekolah	101.857.865.355	16 Sekolah	106.950.758.623	17 Sekolah	112.298.296.554				
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	12 Sekolah	5.459.013.850	13 Sekolah	5.731.964.543	14 Sekolah	6.018.562.770	15 Sekolah	6.319.490.908	16 Sekolah	6.635.465.454	17 Sekolah	6.967.238.726				
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran Terlaksananya Penelusuran kelulusan	4 kegiatan	890.019.600	4 kegiatan	934.520.580	4 kegiatan	981.246.609	4 kegiatan	1.030.308.939	4 kegiatan	1.081.824.386	4 kegiatan	1.135.915.606				
		<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus</b>		<b>8.559.996.700</b>		<b>8.987.996.535</b>		<b>9.437.396.362</b>		<b>9.909.266.180</b>		<b>10.404.729.489</b>		<b>10.924.965.963</b>				
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Terlaksananya Rehab Ruang Bina Wicara Terlaksananya Rehab Ruang keterampilan Terlaksananya Rehab Ruang Guru Terlaksananya rehab Toilet Tersedianya Peralatan dan media bagi peserta didik SLB	32 Sekolah	7.807.020.000	33 Sekolah	8.197.371.000	34 Sekolah	8.607.239.550	35 Sekolah	9.037.601.528	36 Sekolah	9.489.481.604	37 Sekolah	9.963.955.684				

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					2022	2023	2024	2025	2026											
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Perlengkapan Didik Peserta SLB	1 Sekolah	200.000.000	2 Sekolah	210.000.000	3 Sekolah	220.500.000	4 Sekolah	231.525.000	5 Sekolah	243.101.250	6 Sekolah	255.256.313				
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	2 Sekolah	322.085.100	3 Sekolah	338.189.355	4 Sekolah	355.098.823	5 Sekolah	372.853.764	6 Sekolah	391.496.452	7 Sekolah	411.071.275				
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Implementasi KTSP SLB	1 kegiatan	230.891.600	1 kegiatan	242.436.180	1 kegiatan	254.557.989	1 kegiatan	267.285.888	1 kegiatan	280.650.183	1 kegiatan	294.682.692				
	<b>Peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa</b>	1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan</b>	<b>27</b>	<b>367.224.900</b>	<b>33</b>	<b>385.586.145</b>	<b>39</b>	<b>404.865.452</b>	<b>45</b>	<b>425.108.725</b>	<b>51</b>	<b>446.364.161</b>	<b>57</b>	<b>468.682.369</b>			<b>Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>Sumatera Barat</b>
		1.01.03.1.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	<b>Persentase peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik</b>		<b>367.224.900</b>		<b>385.586.145</b>		<b>404.865.452</b>		<b>425.108.725</b>		<b>446.364.161</b>		<b>468.682.369</b>				
		1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Budaya Alam Minang Kabau (BAM)	1 Kegiatan	367.224.900	1 Kegiatan	385.586.145	1 Kegiatan	404.865.452	1 Kegiatan	425.108.725	1 Kegiatan	446.364.161	1 Kegiatan	468.682.369				
		1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>APK SMA APK SMK APM SLB</b>	<b>50,88 31,27 52,87</b>	<b>5.977.961.400</b>	<b>52,38 32,27 53,8</b>	<b>6.276.859.470</b>	<b>53,88 34,27 54,72</b>	<b>6.590.702.444</b>	<b>55,38 35,77 55,65</b>	<b>6.920.237.566</b>	<b>56,88 37,27 56,57</b>	<b>7.266.249.444</b>	<b>58,38 38,77 57,5</b>	<b>7.629.561.916</b>			<b>Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>Sumatera Barat</b>
		1.01.02.1.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C</b>		<b>3.300.092.400</b>		<b>3.465.097.020</b>		<b>3.638.351.871</b>		<b>3.820.269.465</b>		<b>4.011.282.938</b>		<b>4.211.847.085</b>				
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FL2SN, Lomba Debat Bahasa / bahasa Indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran	7 Kegiatan	3.300.092.400	7 Kegiatan	3.465.097.020	7 Kegiatan	3.638.351.871	7 Kegiatan	3.820.269.465	7 Kegiatan	4.011.282.938	7 Kegiatan	4.211.847.085				
		1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C</b>		<b>1.468.960.600</b>		<b>1.542.408.630</b>		<b>1.619.529.062</b>		<b>1.700.505.515</b>		<b>1.785.530.790</b>		<b>1.874.807.330</b>				
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suliki kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA	6 Kegiatan	1.468.960.600	6 Kegiatan	1.542.408.630	6 Kegiatan	1.619.529.062	6 Kegiatan	1.700.505.515	6 Kegiatan	1.785.530.790	6 Kegiatan	1.874.807.330				
		1.01.02.1.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus</b>		<b>1.208.908.400</b>		<b>1.269.353.820</b>		<b>1.332.821.511</b>		<b>1.399.462.587</b>		<b>1.469.435.716</b>		<b>1.542.907.502</b>				
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya LKS SDLB, SMPLB, dan SMALB Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba FL2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba O2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional	3 kegiatan	1.208.908.400	3 kegiatan	1.269.353.820	3 kegiatan	1.332.821.511	3 kegiatan	1.399.462.587	3 kegiatan	1.469.435.716	3 kegiatan	1.542.907.502				

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Peningkatkan daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA	50,88	406.662.906.800	52,38	426.996.052.140	53,88	448.345.854.747	55,38	470.763.147.484	56,88	494.301.304.859	58,38	519.016.370.101			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
				APK SMK	31,27		32,27		34,27		35,77		37,27		38,77					
				APM SLB	52,87		53,8		54,72		55,65		56,57		57,5					
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C		251.808.852.200	74,1	264.399.294.810		277.619.259.551		291.500.222.528		306.075.233.654		321.378.995.337				
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	236 Sekolah	251.808.852.200	237 Sekolah	264.399.294.810	238 Sekolah	277.619.259.551	239 Sekolah	291.500.222.528	240 Sekolah	306.075.233.654	241 Sekolah	321.378.995.337				
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C		148.761.904.950		156.200.000.198		164.010.000.207		172.210.500.218		180.821.025.229		189.862.076.490				
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	111 Sekolah	148.242.308.150	112 Sekolah	155.654.423.558	113 Sekolah	163.437.144.735	114 Sekolah	171.609.001.972	115 Sekolah	180.189.452.071	116 Sekolah	189.198.924.674				
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Bimtek Pembentukan LSP P1 Terlaksananya SMK dan SLB Terlaksana kegiatan Rakor Kemitraan Terlaksananya Verifikasi TUK	2 Kegiatan	519.596.800	2 Kegiatan	545.576.640	2 Kegiatan	572.855.472	2 Kegiatan	601.498.246	2 Kegiatan	631.573.158	2 Kegiatan	663.151.816				
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus		6092149650		6396757133		6716594989		7052424739		7405045976		7775298274				
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	29 Sekolah	6092149650	30 Sekolah	6.396.757.133	31 Sekolah	6.716.594.989	32 Sekolah	7.052.424.739	33 Sekolah	7.405.045.976	34 Sekolah	7.775.298.274				
	Peningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peresentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	69,07	3.482.814.000	71,07	3.656.954.700	74,07	3.839.802.435	77,07	4.031.792.557	80	4.233.382.185	83,02	4.445.051.294			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			3.482.814.000		3.656.954.700		3.839.802.435		4.031.792.557		4.233.382.185		4.445.051.294				
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penguatan Pengawas SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	4 Kegiatan	1.355.758.150	4 Kegiatan	1.423.546.058	4 Kegiatan	1.494.723.360	4 Kegiatan	1.569.459.528	4 Kegiatan	1.647.932.505	4 Kegiatan	1.730.329.130				
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja Guru (KKG) SLB	6 Kegiatan	2.127.055.850	6 Kegiatan	2.233.408.643	6 Kegiatan	2.345.079.075	6 Kegiatan	2.462.333.028	6 Kegiatan	2.585.449.680	6 Kegiatan	2.714.722.164				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
		2022	2023	2024	2025	
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	52,87	53,80	54,72	55,65	56,57
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB /Sederajat	91,70	93,22	94,70	96,20	97,70
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77
	Persentase SMA Negeri terakreditasi	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50
	Persentase SMK Negeri terakreditasi	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75
	Persentase SLB Negeri terakreditasi	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00
2.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	N/A	58,2	58,51	58,82
	Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	N/A	27,4	27,70	28,01
3.	Jumlah SMK yang terevitalisasi	N/A	58,2	58,51	58,82	59,13
	Persentase Guru Kejuruan yang tersedia di SMK	N/A	27,4	27,70	28,01	28,32

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
		2022	2023	2024	2025	
	Persentase Guru Kejuruan yang tersedia di SMK	N/A	3	6	9	12
4.	Rasio guru terhadap murid pada SMA	14,04	14,54	15,05	15,55	16,06
	- Rasio guru terhadap murid pada SMK	12,57	12,95	13,32	13,69	14,07
	- Rasio guru terhadap murid pada SLB	5,27	5,49	5,72	5,95	6,17
	- Kualifikasi guru SMA pendidikan minimal S1/D4	9.584	9.607	9.630	9.643	9.652
	- Kualifikasi guru SMK pendidikan minimal S1/D4	5.902	5.917	5.931	5.946	5.960
	- Kualifikasi guru SLB pendidikan minimal S1/D4	421	428	435	442	449
	- Guru SMA yang bersertifikasi	6.073	6.459	6.845	7.231	7.617
	- Guru SMK yang bersertifikasi	3.808	4.047	4.285	4.524	4.762
	- Guru SLB yang bersertifikasi	239	257	275	293	311
	- Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMA pendidikan minimal S1/D4	1.026	1.088	1.149	1.211	1.273
	- Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMK pendidikan minimal S1/D4	508	542	577	611	645



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
		2022	2023	2024	2025	
	- Kualifikasi Tenaga Kependidikan SLB pendidikan minimal S1/D4	44	46	47	49	50

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 di Bidang Urusan Pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan ada kesatuan langkah dan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam rangka memajukan dunia pendidikan melalui pelayanan pendidikan yang terencana, terarah, dan terpadu sehingga akan terwujud suatu hasil pembangunan dalam bidang pendidikan yang diinginkan.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, telah terpetakan dalam dokumen ini. Diperlukan konsistensi, komitmen, dan kerjasama yang kuat dari UPTD, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VIII, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan maupun pihak terkait, agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan berdaya guna serta dapat mendorong dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan mempertimbangan hal tersebut, maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dikembangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam Misi Ke-1 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”**.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Pendidikan serta digunakan sebagai

bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang pendidikan serta mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.